



Kinerja BPOM

Dalam Angka

Triwulan I Tahun 2024



KINERJA BPOM DALAM ANGKA

TRIWULAN I TAHUN 2024

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah persetujuan 62.624 NIE, pemeriksaan terhadap 7.035 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 11.676 sampel, 60 perkara, dan 139 kegiatan pelaksanaan KIE.

Di tengah dinamika global dan tantangan pengawasan yang semakin kompleks, termasuk isu-isu krusial seperti maraknya peredaran obat ilegal dan pangan yang tidak aman, BPOM semakin memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum. Kasus-kasus besar seperti peredaran obat-obatan yang mengandung zat berbahaya dan skandal impor pangan ilegal menunjukkan betapa pentingnya peran BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat. Dengan inovasi teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, BPOM berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. BPOM juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendukung pelaku usaha, termasuk UMKM, agar dapat menghasilkan produk yang aman dan berdaya saing.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2024. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 28 Juni 2024
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Dr. Dra. L. Rizka Andalucia, M.Pharm., Apt.

Daftar Isi

SAMBUTAN BPOM RI	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
HIGHLIGHT	1
BAB 1 Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan	7
BAB 2 Penindakan di Bidang Obat dan Makanan.....	13
BAB 3 Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman.....	17
BAB 4 Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	21
BAB 5 Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan	23
BAB 6 Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat	25
BAB 7 Digitalisasi Pelayanan Publik.....	35
BAB 8 Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan	41
BAB 9 Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	43
BAB 10 Kerjasama Internasional	47
BAB 11 Sumber Daya Manusia	49
BAB 12 Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024	53
BAB 13 Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	55
Penutup	55
Lampiran	56

Daftar Gambar

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan	7
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan	7
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	8
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.....	8
Gambar 5.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan.....	11
Gambar 6.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan.....	11
Gambar 7.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan.....	12
Gambar 8.	Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan.....	13
Gambar 9.	Hasil Operasi Intelijen s.d Triwulan I Tahun 2024	14
Gambar 10.	Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan I Tahun 2024.....	15
Gambar 11.	Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia s.d. Triwulan I Tahun 2024 ...	16
Gambar 12.	Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi Badan POM s.d. Triwulan 1 Tahun 2024.....	25
Gambar 13.	Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan I tahun 2024.....	25
Gambar 14.	Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d Triwulan I Tahun 2024	26
Gambar 15.	Sebaran Pemberitaan Isu Obat dan Makanan di Media s.d Triwulan I Tahun 2024.....	26
Gambar 16.	Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform s.d Triwulan I Tahun 2024.....	27
Gambar 17.	Pertumbuhan Audiens Berdasarkan Platform s.d Triwulan I Tahun 2024	28
Gambar 18.	Engagement Per Platform s.dTriwulan I Tahun 2024	28
Gambar 19.	Top Engagement Content terkait Badan POM pada Platform Facebook, X, Instagram dan Youtube s.d Triwulan I Tahun 2024	29
Gambar 20.	Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MaPOM) Vol.5/No.4/2023	29
Gambar 21.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d Triwulan I Tahun 2024	30
Gambar 22.	Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik pada Triwulan I Tahun 2024.....	31
Gambar 23.	Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi	32
Gambar 24.	Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM	32
Gambar 25.	Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi.....	33
Gambar 26.	Topik Layanan Infomasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM	33
Gambar 27.	Fitur BPOM Mobile	35
Gambar 28.	Aktivitas BPOM Mobile s.d Triwulan I tahun 2024.....	36
Gambar 29.	Tampilan Login Portal SIPT.....	38
Gambar 30.	Dashboard Data Pengajuan pada Layanan Helpdesk Pusdatin	39
Gambar 31.	Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan I Tahun 2024.....	42
Gambar 32.	Realisasi Anggaran s.d Triwulan I 2024	53

Daftar Tabel

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Target).....	9
Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)	10
Tabel 3. Profil Laporan Efek Sampling	12
Tabel 4. Rincian Hasil Penilaian Indeks RB Badan POM Tahun 2023.....	44
Tabel 5. Hasil Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi UJIPEDIA s.d. Triwulan I Tahun 2024.....	50
Tabel 6. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi PENKOMTEK s.d. Triwulan I Tahun 2024.....	50
Tabel 7. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi SIPENATEMANKU s.d. Triwulan I Tahun 2024	51
Tabel 8. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi IDEAS s.d. Triwulan I Tahun 2024.....	52

Highlight

Kemenpan RB Apresiasi atas Capaian RB dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan POM (Jakarta, 19 Januari 2024)



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto mengunjungi kantor BPOM. Pada pertemuan ini, Plt. Kepala BPOM, L. Rizka Andalusia berdiskusi dan menyampaikan komitmen Badan POM dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Di kesempatan yang sama, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto menerangkan bahwa saat ini, birokrasi semakin dinamis dan harus dapat merespons perubahan yang sangat cepat di era digital saat ini. Ia juga mengapresiasi capaian RB dan SAKIP Badan POM yang sudah sangat baik dan agar terus ditingkatkan. Di akhir diskusi, Plt. Kepala Badan POM menyatakan bahwa Badan POM berusaha melakukan yang terbaik dalam hal pengawasan obat dan makanan. Ia juga meminta kerja sama dan dukungan dari Kementerian PANRB.

Penajaman Strategi Pengawasan CPOB Secara Menyeluruh (Pekanbaru, 29–31 Januari 2024)



Inspektur Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) baik di tingkat pusat maupun di unit pelaksana teknis (UPT) Badan POM harus tetap menunjukkan kinerja optimal dalam segala kondisi dan tekanan yang ada. Sebagai evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan inspeksi sepanjang tahun 2023, sekaligus untuk menyusun perencanaan inspeksi di tahun 2024, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan UPT Badan POM dalam Manajemen Inspeksi CPOB Tahun 2024. Rapat ini diikuti seluruh inspektur CPOB dan dibuka langsung oleh Pelaksana Teknis (Plt.) Kepala BPOM RI, L Rizka Andalusia serta menghadirkan narasumber dari *stakeholders* Badan POM yaitu dari Direktorat Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian, Putu Nadi Astuti. Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini diharapkan implementasi Sistem Mutu inspektorat CPOB tetap dapat berjalan secara konsisten serta para inspektur CPOB dapat terus melakukan *continuous improvement*, mengembangkan kapasitas dan kompetensinya untuk pengawasan yang lebih baik ke depan.

Apresiasi Atas Kolaborasi Mitra Strategis dalam Pengawasan Obat dan Makanan (Jakarta, 04 Februari 2024)



Pada puncak acara peringatan HUT Badan POM yang mengusung tema “Kolaborasi Hingga Pelosok Negeri untuk Melindungi Masyarakat” Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI, L Rizka Andalusia dalam sammbutannya menyampaikan bahwa Badan POM tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan obat dan makanan. Pada acara tersebut, Badan POM memberikan penghargaan kepada para mitra eksternal sebagai apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik. Terdapat lima kelompok mitra strategis yang mendapatkan penghargaan, yaitu masyarakat; mitra internasional dan kerja sama dalam negeri; apotek yang aktif melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi; media; serta pemerintah daerah tematik. Badan POM juga memberikan penghargaan kepada media massa yang banyak membantu Badan POM dalam menyampaikan informasi mengenai obat dan makanan serta kinerja Badan POM secara berimbang kepada masyarakat.

Badan POM Kolaborasi dengan PMDA Jepang untuk Perkuat Hubungan Indonesia-Jepang (Jakarta, 19 Februari 2024)



Indonesia dan Jepang telah membangun kerja sama di bidang pengawasan obat. Kerja sama ini tergambar dalam Plan of Action (PoA) yang telah disusun di bawah naungan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Badan POM dengan Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Jepang tentang Kerangka Dialog dan Kerja Sama Regulasi Produk Medis yang ditandatangani pada 27 Agustus 2021. Untuk memperkuat kerja sama tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI, L Rizka Andalusia menerima kunjungan dari *The Pharmaceuticals and Medical Devices Agency* (PMDA). Dalam kesempatan ini, Uzu Shinobu, PMDA *Senior Executive Director*, menjelaskan bahwa agenda kunjungan saat ini termasuk membahas mengenai sejumlah rencana kerja sama yang akan dilakukan dan pertemuan di Tokyo pada bulan April 2024 mendatang. Pertemuan yang akan diselenggarakan di Tokyo membahas secara komprehensif mengenai pengawasan obat.

BPOM Wujudkan Kemandirian Produk Darah Dalam Negeri Melalui Pendampingan Berkelanjutan (Jakarta, 04 Maret 2024)



“Industri fraksionasi plasma sebagai produk biopharmaceutical merupakan salah satu fokus pengembangan untuk mewujudkan cita-cita kemandirian produk derivat plasma di Indonesia,” jelas Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia pada para peserta dalam *Workshop on Development of Plasma Master File in Indonesia*. Kegiatan yang diselenggarakan bersama World Health Organization (WHO) ini merupakan pendampingan berkelanjutan dari BPOM kepada unit donor darah (UDD) guna mewujudkan kemandirian produk darah dalam negeri. Saat ini, seluruh produk derivat plasma yang digunakan di Indonesia merupakan produk impor dengan harga yang tinggi. Di sisi lain, permintaan terhadap produk derivat plasma dalam negeri maupun tingkat global juga sangat tinggi. Menangani permasalahan tersebut, pemerintah secara bertahap mulai mengganti produk derivat plasma yang diimpor dengan harga mahal menjadi produk dalam negeri.

Konsolidasi Implementasi Perluasan Layanan Kesehatan Nasional (Jakarta, 22 Maret 2024)



Badan POM bersama dengan seluruh stakeholder bidang kesehatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Komite Bidang Kesehatan Triwulan I tahun 2024 bertema “Manajemen Risiko dan Isu Strategis dalam Implementasi Layanan Kesehatan Program JKN”. Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt. Kepala Badan POM RI, L Rizka Andalusia, selaku tuan rumah. Rapat koordinasi ini dibuka dengan paparan terkait Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Beliau menjelaskan, RIBK ini bertujuan memastikan keselarasan rencana strategis dari seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan, baik secara horizontal maupun vertikal. Pada kegiatan tersebut, turut hadir Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin. Dalam kesempatan ini, Ia menegaskan, perencanaan bidang kesehatan ini harus dievaluasi secara berkala setiap 3 bulan.

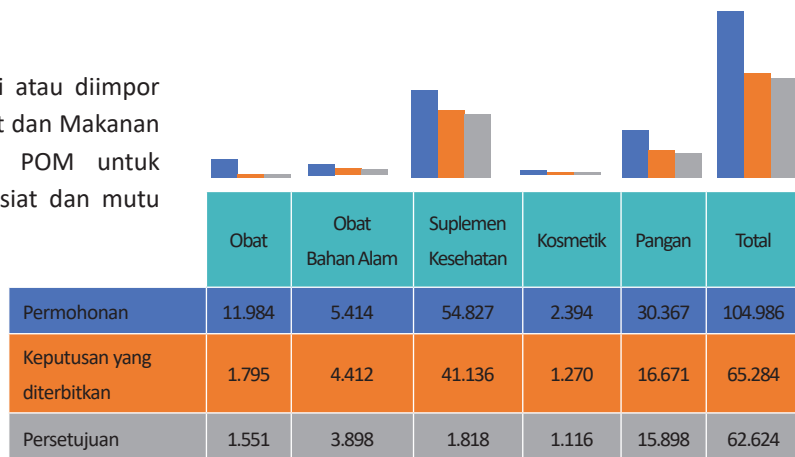
BAB 1

Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

Pengawasan *Pre-market*

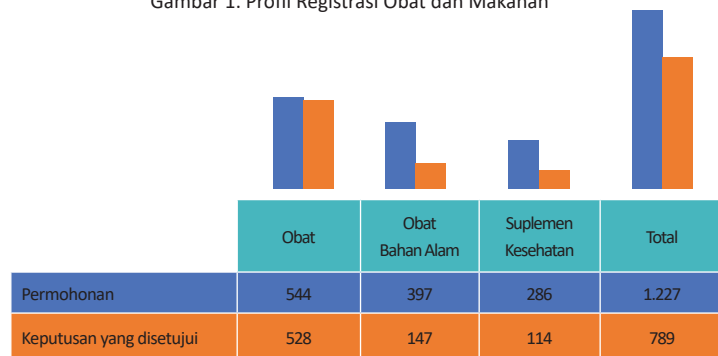
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh Badan POM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, telah diterbitkan 65.284 keputusan dan 62.624 persetujuan izin edar dari 104.986 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, dari 1.227 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 789 (64,30%) iklan.



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

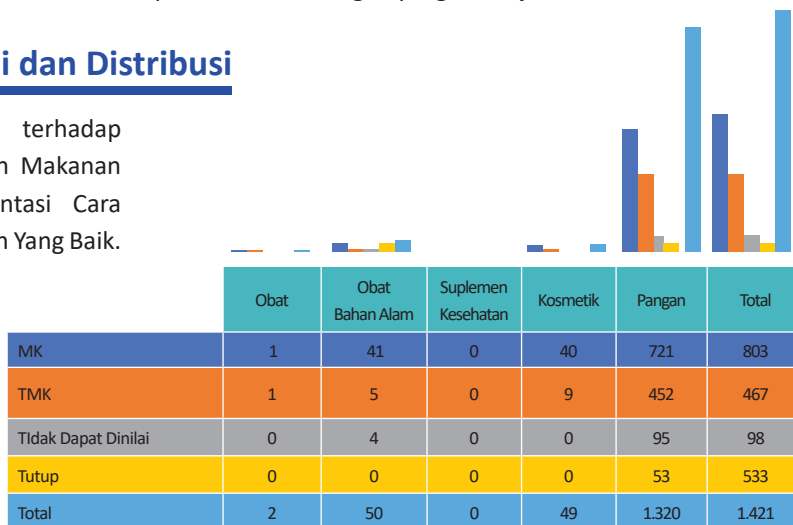
Pengawasan *Post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

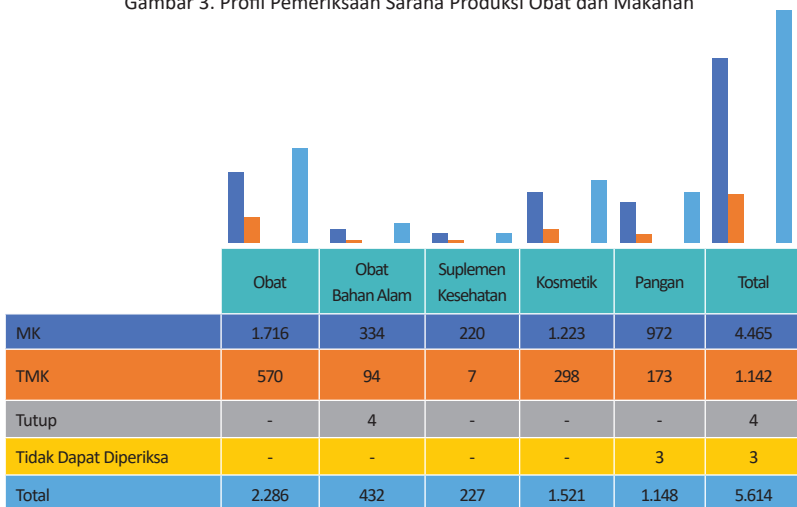
Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 telah diperiksa sebanyak 1.421 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 467 (36,77%) sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 telah diperiksa sebanyak 5.614 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan 1.142 (20,37%) sarana adalah TMK.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Sampling dan Pengujian Laboratorium

a. Targeted

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Target)

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/ Illegal/ Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Tageted	550	-	-	-	-	550	375	365	10	10	175	375
Obat Bahan Alam	Tageted	599	-	-	-	-	599	416	385	31	31	183	416
Kuasi	Tageted	42	-	-	-	-	42	22	22	-	-	20	22
Suplemen Kesehatan	Tageted	182	-	-	-	-	182	113	105	8	8	69	113
Kosmetik	Tageted	1.365	-	-	-	-	1.365	964	865	99	99	401	964
Rokok	Tageted	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pangan	Tageted	898	-	-	-	-	898	716	596	120	120	182	716

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM Triwulan I 2024

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, dari 3.636 sampel targeted yang disampling terdapat 2.606 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 268 (10,28%) sampel tidak memenuhi syarat.

b. Random

Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/ Illegal/ Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Random	2.908	-	-	-		2.908	2.066	2.018	48	48	842	2.066
Obat Bahan Alam	Random	2.010	-	-	-		2.010	1.485	1.340	145	145	525	1.485
Kuasi	Random	114	-	-	-		114	80	80	-	-	34	80
Suplemen Kesehatan	Random	544	-	-	-		544	365	340	25	25	179	365
Kosmetik	Random	3.505	-	-	-	2	3.505	2.623	2.470	153	153	882	2.623
Pangan	Random	3.494	-	-	-	4	3.494	2.451	2.171	280	280	1.043	2.451

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM Triwulan I 2024

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, dari 12.575 sampel random yang disampling terdapat 9.070 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 651 (7,18%) sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:

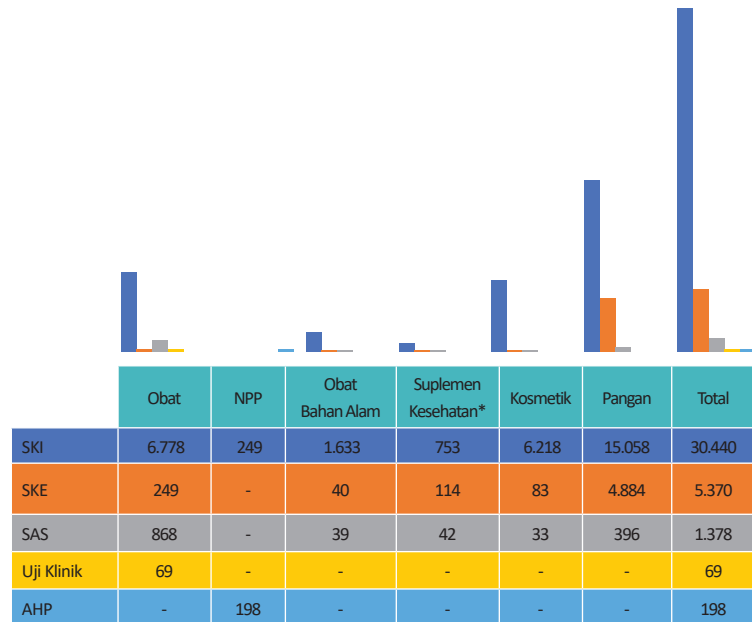
MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

TIE = Tanpa izin Edar

Sertifikasi

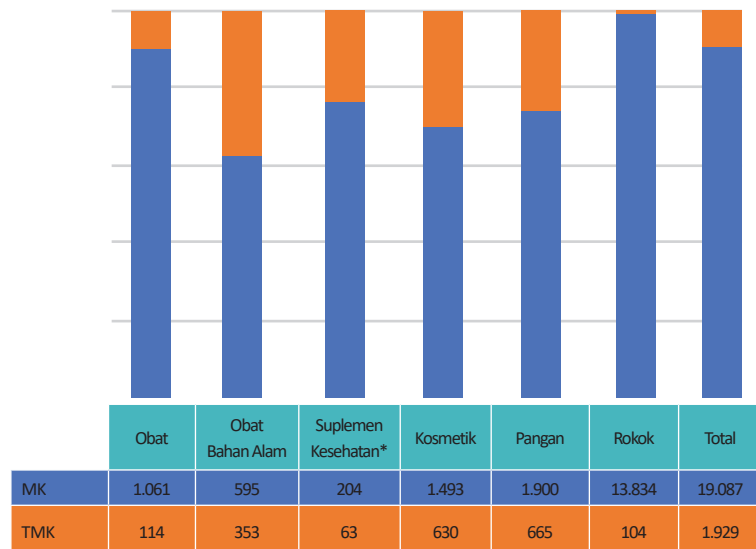
Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, Badan POM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (Special Access Scheme), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan I tahun 2024 telah diterbitkan 30.440 SKI, 5.370 SKE, 1.378 SAS, 69 Uji Klinik, dan 198 AHP Obat dan Makanan.



Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

Pengawasan Iklan

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, Badan POM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan leaflet/brosur. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, dari 21.016 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 1.929 (9,18%) iklan tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

* Termasuk Kuasi

Pengawasan Label

Badan POM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui Badan POM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, dari 31.552 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 972 atau sekitar 3,08% label tidak memenuhi ketentuan.

* Termasuk Kuasi



Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping

	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindaklanjut	%
Obat	5.152	4.252	82,53
Obat Bahan Alam	12	12	100,00
Suplemen Kesehatan	23	23	100,00
Kosmetik	262	254	96,95



Penggunaan Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, Badan POM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia:

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

BAB 2

Penindakan di Bidang Obat dan Makanan

1. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, Badan POM menyusun aplikasi peta kerawanan kejahatan, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

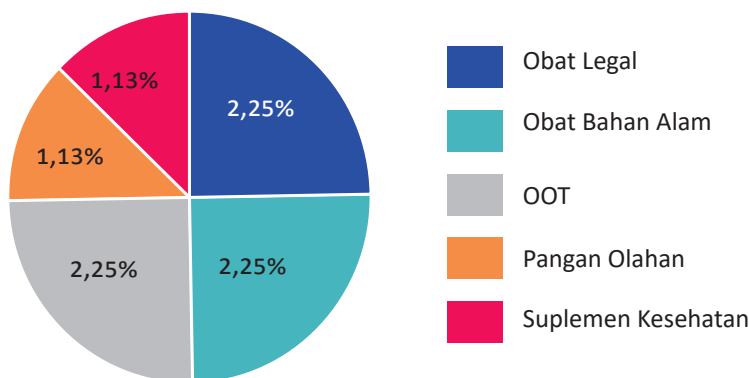


Gambar 8. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan data kerawanan kejahatan yang aktual sebanyak 1.435 kasus yang terdiri dari 600 kasus terkait obat, 247 kasus terkait obat bahan alam, 71 kasus suplemen kesehatan, 405 kasus terkait kosmetik dan 112 kasus terkait komoditi pangan.

2. Hasil Kegiatan dan Operasi Intelijen

Peran Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan sangat strategis seiring dengan masih banyaknya temuan terkait Obat dan Makanan ilegal baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya Badan POM untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan/operasi intelijen guna meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan baik pada tahap *premarket* maupun *postmarket*. Kegiatan/operasi intelijen telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan berbagai kasus komoditi di antaranya kasus obat, NAPPZA, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan pangan olahan baik yang berujung ditindaklanjuti dengan saksi administrasi maupun *projusticia*.

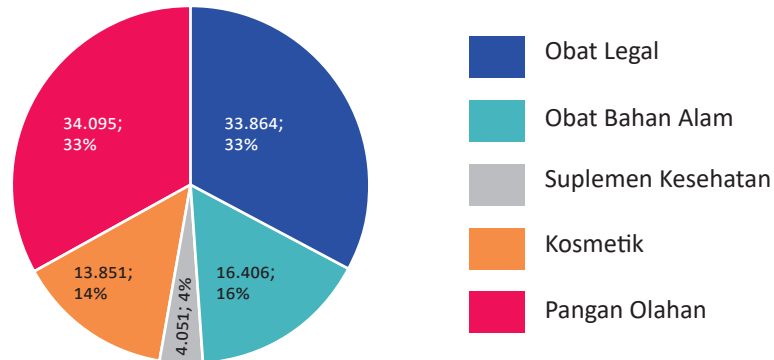


Gambar 9. Hasil Operasi Intelijen s.d Triwulan I Tahun 2024

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, telah disusun 70 laporan informasi dari pelaksanaan kegiatan intelijen dan 9 laporan intelijen dari pelaksanaan operasi intelijen. Dari seluruh rangkaian kegiatan dan operasi intelijen tersebut telah dihasilkan 8 rekomendasi intelijen dengan 2 rekomendasi terkait kasus peredaran obat ilegal, 2 rekomendasi terkait kasus obat bahan alam ilegal, 2 rekomendasi kasus obat-obat tertentu, 1 rekomendasi kasus suplemen kesehatan serta 1 rekomendasi terkait kasus pangan olahan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh unit penerima rekomendasi.

3. Hasil Patroli Siber

Dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring, Badan POM telah melakukan kegiatan patroli siber untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan I Tahun 2024

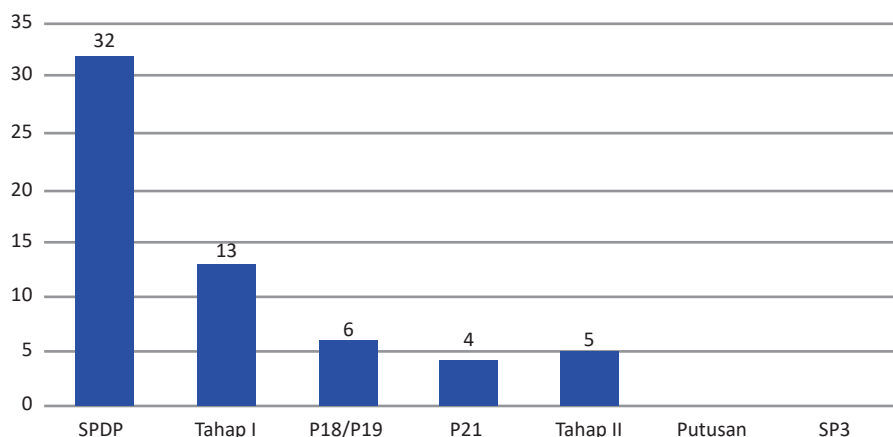
Berdasarkan data hasil patroli siber Obat dan Makanan sampai dengan triwulan I tahun 2024, ditemukan 102.266 *link* yang teridentifikasi menjual Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Hasil Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 60 perkara. Sebanyak 32 perkara masih dalam tahap SPDP, 13 perkara pada tahap I, 6 perkara pada tahap P18/19, 4 perkara pada tahap P21, 5 perkara pada tahap II dan belum ada perkara yang mendapatkan putusan pengadilan.



Gambar 11. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia s.d. Triwulan I Tahun 2024



BAB 3

Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun peraturan/standar/pedoman di bidang Obat dan Makanan.

Obat

Pada tahun 2024, terdapat 17 peraturan/standar/pedoman yang disusun oleh Badan POM. Daftar 17 peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan Badan POM No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia (45%).
2. Revisi Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2015 tentang Obat Pengembangan Baru (45%).
3. Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin (45%).
4. Revisi Peraturan Badan POM tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (45%).
5. Revisi Peraturan Badan POM No. 30 Tahun 2022 tentang Pemasukan Obat dan Bahan Obat Melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Access Scheme*) (85%).
6. Revisi Peraturan Kepala Badan POM No. 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis (85%).
7. Surat Edaran tentang Pemberitahuan Masa Peralihan Perundang-undangan Substansi Obat yang Berakhir pada Tahun 2024 (100%).
8. Peraturan Badan POM tentang Pedoman Pengkajian Keamanan dan/atau Mutu Obat dan Bahan Obat (45%).
9. Peraturan Badan POM tentang Pedoman Verifikasi Metode Analisis Obat dan Bahan Obat (45%).
10. Standard Mutu Obat Baru (15%).
11. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Sentra Uji Klinik dan Sentra Uji BE (15%).
12. Rancangan Keputusan Badan POM tentang Standar Informasi Obat (60%).
13. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Tata Cara Penilaian Pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik di Fasilitas Produksi dan Cara Distribusi Obat yang Baik di Fasilitas Distribusi (45%).

14. Rancangan Peraturan Badan POM Tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM No. 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (45%).
15. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi (15%).
16. Revisi Keputusan Kepala Badan POM No. 65 Tahun 2022 tentang Daftar Obat Generik Tertentu Wajib Uji Bioekivalensi (15%).
17. Revisi Keputusan Kepala Badan POM No. 148 Tahun 2023 tentang Pedoman Cara Regulatori Obat yang Baik dan Penyusunan *Tools* Monitoring serta Evaluasi Implementasinya (45%).

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Terdapat 10 peraturan/standar/pedoman obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disusun oleh Badan POM pada tahun 2024. Daftar 10 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan Badan POM No. 14 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (25%).
2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Penerapan Program Manajemen Risiko di Fasilitas Industri Obat Bahan Alam (25%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Kajian Risiko terhadap Bahan Tambahan yang Digunakan dalam Sediaan Tertentu Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (25%).
4. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (90%).
5. Rancangan Perubahan Peraturan Badan POM No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (40%).
6. Rancangan Perubahan Peraturan Badan POM No. 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (40%).
7. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Uji Klinik (25%).
8. Revisi Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan (40%).
9. Revisi Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika (25%).
10. Rancangan Perubahan Peraturan Badan POM No. 32 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (80%).

Sampai dengan triwulan I tahun 2024 telah diselesaikan 47 kajian dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 85 hari kerja). Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.

Pangan

Terdapat 11 peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang disusun oleh Badan POM pada tahun 2024. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam rangka Antisipasi *Emerging Issue* melalui Penelaahan Regulasi Cemaran Pangan Olahan di Berbagai Negara (20%).
2. Kajian terhadap Penjualan Pangan Curah melalui Depot (20%).
3. Pedoman Penetapan Masa Simpan untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (20%).
4. Pedoman Implementasi Peraturan Badan POM terkait Kemasan Pangan (20%).
5. Amandemen Peraturan Badan POM No. 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (83%).
6. Revisi Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi (39%).
7. Revisi Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2020 tentang Pangan Keperluan Gizi Khusus (39%).
8. Amandemen Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2021 tentang Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis (50%).
9. Amandemen Peraturan Badan POM No. 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan (30%).
10. Revisi Peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 Label Pangan Olahan (60%).
11. Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan (8%).

Badan POM juga menyusun rekomendasi kebijakan terkait pangan olahan. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 telah diselesaikan 52 rekomendasi kebijakan dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu.

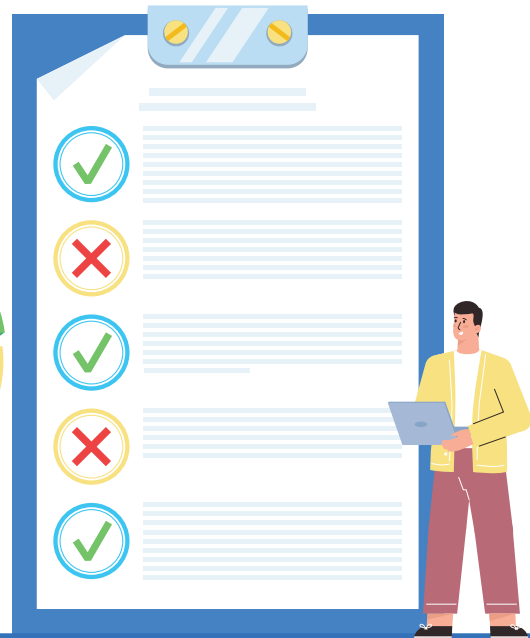


BAB 4

Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Analisis kebijakan Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2024 terdapat 7 topik riset dan kajian yang dilaksanakan oleh Badan POM. Daftar riset dan kajian beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

1. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan (17%).
2. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia *Risk Assessment* (45%).
3. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 (25%).
4. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Badan POM Tahun 2024 (38%).
5. Pengukuran Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 (25%).
6. Analisis Efektivitas Implementasi Konsep Regionalisasi Laboratorium Badan POM (29%).
7. Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2024 dan Penyusunan Pedoman Sampling Obat dan Makanan Tahun 2025 (10%).



BAB 5

Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

1. Metode Analisis yang Dikembangkan

Badan POM terus mengembangkan metode analisis Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar sesuai dengan persyaratan terkini. Pengembangan metode analisis dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 telah dikembangkan 20 metode analisis.

2. Baku Pembanding yang Dikembangkan

Pengembangan baku pembanding dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 telah dikembangkan 9 baku pembanding.

3. Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

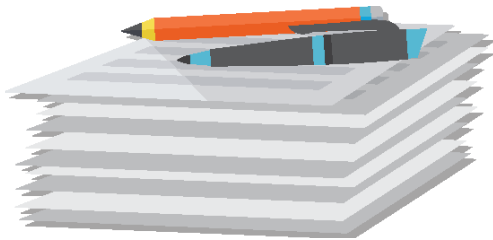
Badan POM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel *lot release* vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, terdapat 60 sampel yang telah selesai uji dan memenuhi ketentuan *timeline*.

4. Alat Pengujian Laboratorium Badan POM yang Dikalibrasi Sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, telah dilakukan kalibrasi terhadap 359 peralatan laboratorium Obat dan Makanan.

5. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, *workshop*, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan Badan POM maupun eksternal sesuai lingkup pengujian/keahlian. Pada tahun 2024, Badan POM menargetkan partisipasi dalam 14 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, Badan POM telah berpartisipasi dalam 12 jejaring laboratorium.



BAB 6

Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

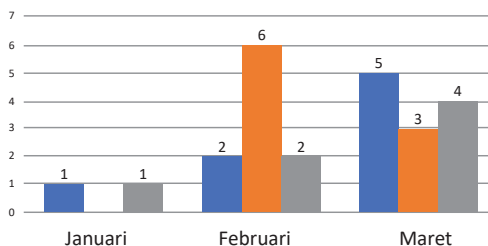
Sampai dengan triwulan I tahun 2024, Badan POM telah menerbitkan 2 siaran pers dan penjelasan/klarifikasi terkait isu Obat dan Makanan yang terdiri dari 1 siaran pers dan 1 penjelasan/klarifikasi. Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas antara lain obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum. Topik yang dibahas pada siaran pers triwulan I terkait dengan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sementara dalam penjelasan/klarifikasi topik yang dibahas adalah obat dan NAPPZA. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi dipublikasikan melalui *website* dan media sosial Badan POM.



Gambar 12. Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi Badan POM s.d. Triwulan 1 Tahun 2024

Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara, *talkshow* dan pemberian jawaban tertulis. Selama triwulan I tahun 2024, Badan POM menerima 24 permohonan dari media dan seluruh permohonan sudah ditindaklanjuti dengan rincian 8 wawancara langsung, 7 *talkshow* dan 9 jawaban tertulis.

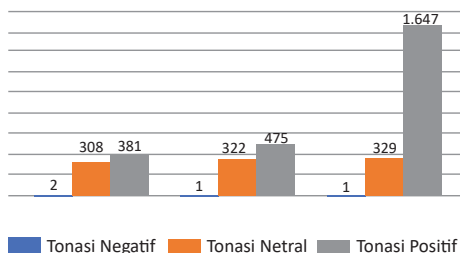
■ Siaran Pers ■ Penjelasan/Klarifikasi



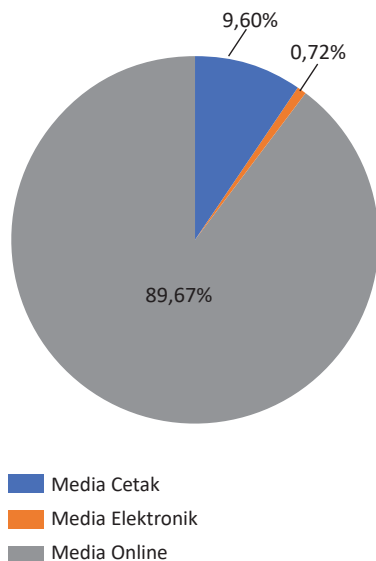
Gambar 13. Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan I tahun 2024

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, terdapat 3.467 pemberitaan terkait Obat dan Makanan maupun Badan POM. Dari seluruh pemberitaan tersebut, sejumlah 72,19% bertonasi positif (2.503 berita), 27,66% bertonasi netral (959 berita), dan 0,14% bertonasi negatif (5 berita). Tonasi berita positif muncul dari berbagai kegiatan Badan POM serta banyaknya pernyataan Badan POM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik Obat dan Makanan yang tidak mengutip Badan POM.

■ Wawancara Langsung ■ Tertulis ■ Talkshow



Gambar 14. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d Triwulan I Tahun 2024



Gambar 15. Sebaran Pemberitaan Isu Obat dan Makanan di Media s.d Triwulan I Tahun 2024

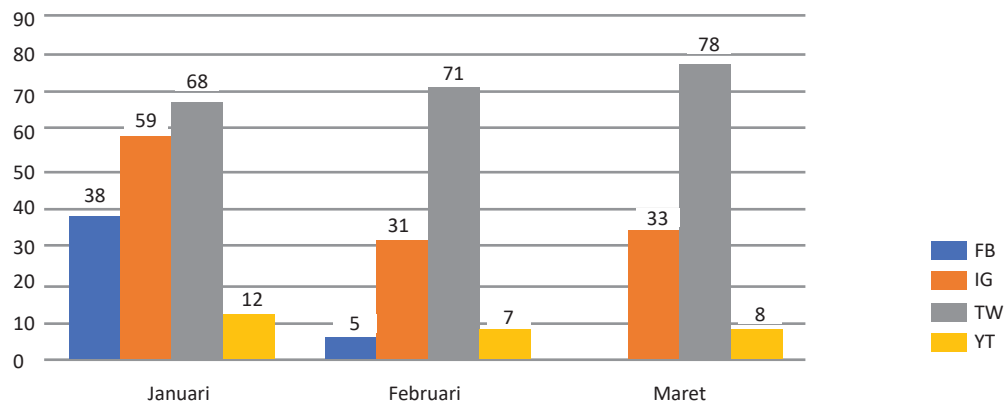
Tingginya pemberitaan bertonasi positif pada bulan Maret disebabkan oleh pemberitaan terkait pemusnahan 1 ton roti *milk bun* oleh Badan POM dan Bea Cukai. Pada bulan yang sama, Badan POM melalui Balai Besar/Balai/Loka POM mulai intensif melakukan pengawasan pangan selama Ramadan dan jelang Idulfitri 2024. Pemberitaan bertonasi negatif terkait dengan kritik terhadap pengawasan Obat dan Makanan di Manado serta opini dari Dinas Kesehatan Lampung mengenai mahalannya sertifikasi Badan POM bagi UMKM.

Berdasarkan jenis media, pemberitaan terkait Obat dan Makanan serta Badan POM hampir seluruhnya berasal dari media *online* sebesar 89,67% (3.109 berita), sedangkan media cetak sebesar 9,60% (333 berita) dan media elektronik 0,72% (25 berita).

Selama triwulan I tahun 2024, terdapat berbagai isu pemberitaan terkait dengan Badan POM. Topik pemberitaan pada bulan Februari mengenai kandungan bromat pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) mendapatkan respon dari Badan POM dan produsen AMDK. Badan POM menegaskan akan menindak produk AMDK yang tidak sesuai ketentuan. Pada bulan Maret, pemberitaan mengenai pemusnahan *milk bun* dan suplemen kesehatan mencapai lebih dari 100 pemberitaan. Hal ini mengindikasikan minat media dalam memberitakan kedua isu tersebut. Pada isu *milk bun*, produk tersebut merupakan pangan olahan yang sedang viral dan nilai produk yang dimusnahkan cukup besar yaitu senilai 400 juta rupiah. Pada isu mengenai suplemen kesehatan benkoji, media memberitakan mengenai kasus kematian dan kesakitan yang diduga disebabkan oleh konsumsi suplemen tersebut. Menanggapi berita yang muncul, Badan POM menegaskan bahwa produk tersebut tidak beredar di Indonesia.

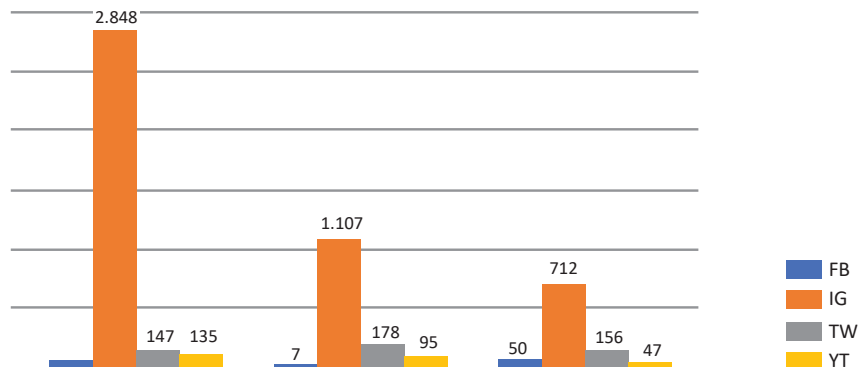
Pada triwulan I tahun 2024, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 *platform* media sosial yaitu Facebook, Instagram, X, dan Youtube cukup konsisten dengan rata-rata 1-2 unggahan per hari. *Platform* X merupakan *platform* dengan aktivitas tertinggi yaitu sebanyak 217 *tweets* dibandingkan dengan 3 *platform* media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah Instagram dengan 123 unggahan, menyusul Facebook sebanyak 43 unggahan, serta Youtube sebanyak 27 unggahan.

Secara garis besar, total unggahan selama triwulan I di berbagai *platform* adalah 410 konten, dengan rincian 177 unggahan di bulan Januari, 114 unggahan di bulan Februari, dan 119 unggahan di bulan Maret. Rincian jumlah unggahan selama triwulan I di berbagai *platform* sebagai berikut:



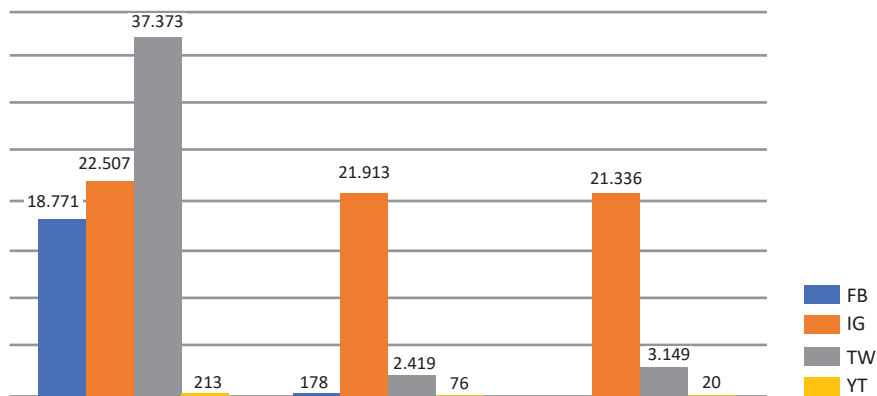
Gambar 16. Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform s.d Triwulan I Tahun 2024

Sementara itu, pertumbuhan audiens/khalayak/pengunjung selama triwulan I pada 4 *platform* media sosial terpantau fluktuatif. Instagram merupakan *platform* dengan total audiens tertinggi pada triwulan I ini dengan jumlah 4.668 audiens, sementara di peringkat kedua *platform* X dengan jumlah 481 audiens, dilanjutkan dengan Youtube dengan jumlah 277 audiens, dan Facebook dengan 57 audiens. Pertumbuhan audiens tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 3.130 audiens, disusul bulan Februari sebanyak 1.388 audiens dan bulan Maret sebanyak 965 audiens.



Gambar 17. Pertumbuhan Audiens Berdasarkan Platform s.d Triwulan I Tahun 2024

Selama triwulan I, *engagement* pada setiap *platform* cenderung fluktuatif. *Engagement* tertinggi terjadi pada bulan Januari, dengan jumlah 45.228, diikuti bulan Februari 24.586, dan Maret sebesar 24.535. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan Januari karena terdapat konten hasil kolaborasi dengan Bea Cukai.



Gambar 18. Engagement Per Platform s.d Triwulan I Tahun 2024

Top engagement content terkait Badan POM di keempat platform pada triwulan I dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 19. Top Engagement Content terkait Badan POM pada Platform Facebook, X, Instagram dan Youtube s.d Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2024, Badan POM telah menerbitkan Majalah POM (MaPOM) Vol.5/No.4/2023 pada 31 Maret 2024 dengan mengusung tema utama Perkuat Jejaring Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Tema ini dipilih untuk merangkum perjalanan Badan POM yang tengah memperkuat jejaring pengawasan di daerah dengan diresmikannya tiga Loka POM dan peningkatan status delapan Loka POM menjadi Balai POM. Pembentukan dan penguatan jaringan pengawasan obat dan makanan di daerah juga diharapkan mampu mempererat sinergi lintas sektor terkait.

di Daerah.

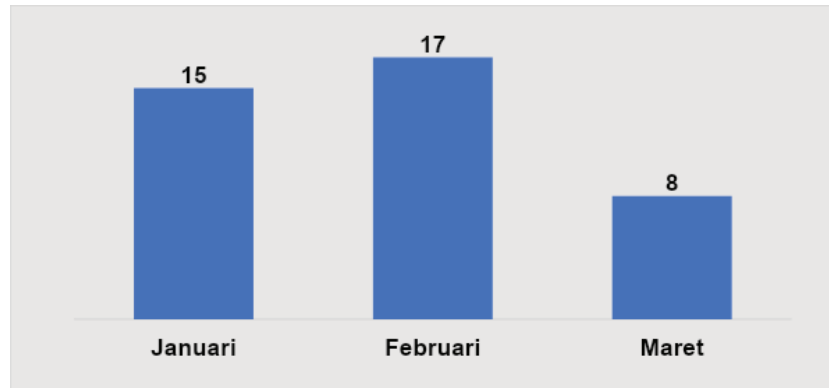


Gambar 20. Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MaPOM) Vol.5/No.4/2023



Gambar 21. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d Triwulan I Tahun 2024

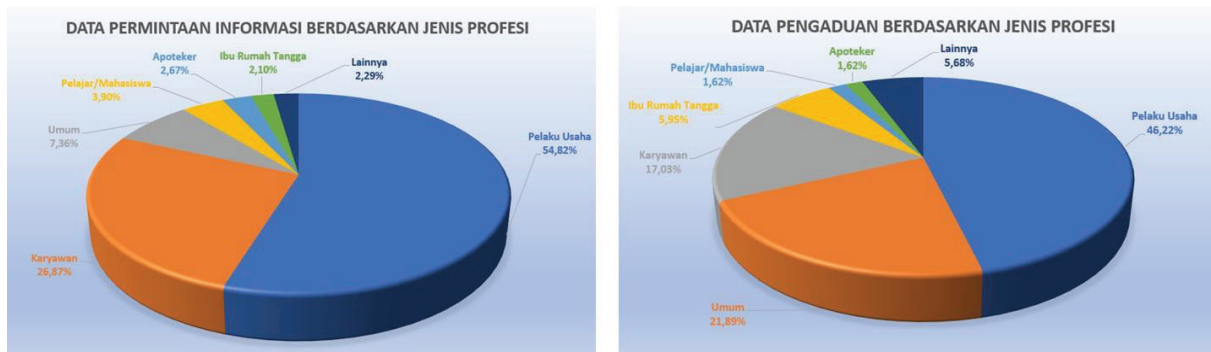
Pada triwulan I tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan POM telah menerima 40 permintaan informasi dari pemohon informasi publik. Profil pemohon informasi berdasarkan profesi yaitu pelajar/mahasiswa (73%), karyawan (13%), apoteker (2%), sarjana hukum (2%), dan masyarakat umum lainnya (10%).



Gambar 22. Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik pada Triwulan I Tahun 2024

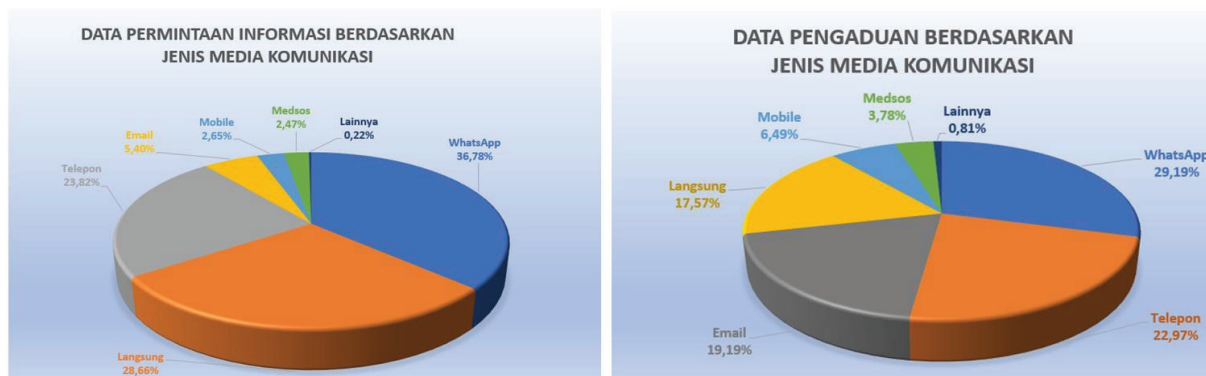
Dari 40 permintaan informasi publik yang diterima oleh Badan POM, sebanyak 36 permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 4 permintaan informasi dikabulkan sebagian, dan tidak ada permintaan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klafisikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian yaitu tidak lebih dari 17 hari kerja dengan rata-rata waktu penyelesaian adalah 2,73 hari kerja.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan sampai dengan triwulan I tahun 2024, Badan POM telah melaksanakan layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui ULPK Pusat dan 76 Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia serta *Contact Center* HALOBPOM sebanyak 11.286 layanan, terdiri dari 10.916 (96,72%) layanan permintaan informasi dan 370 (3,28 %) layanan pengaduan.



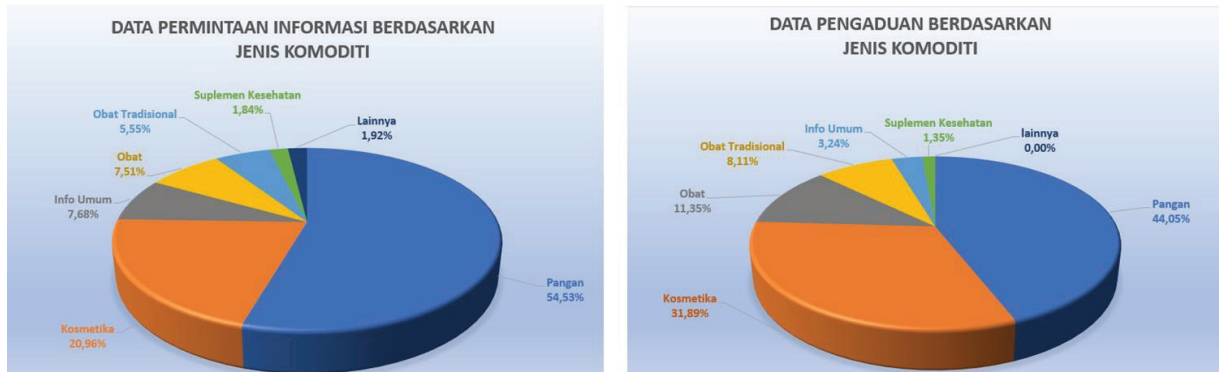
Gambar 23. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 5.984 (54,82%) layanan dan karyawan sebanyak 2.933 (26,87%) layanan, sementara untuk layanan pengaduan sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 171 (46,22%) layanan dan umum sebanyak 81 (21,89%) layanan.



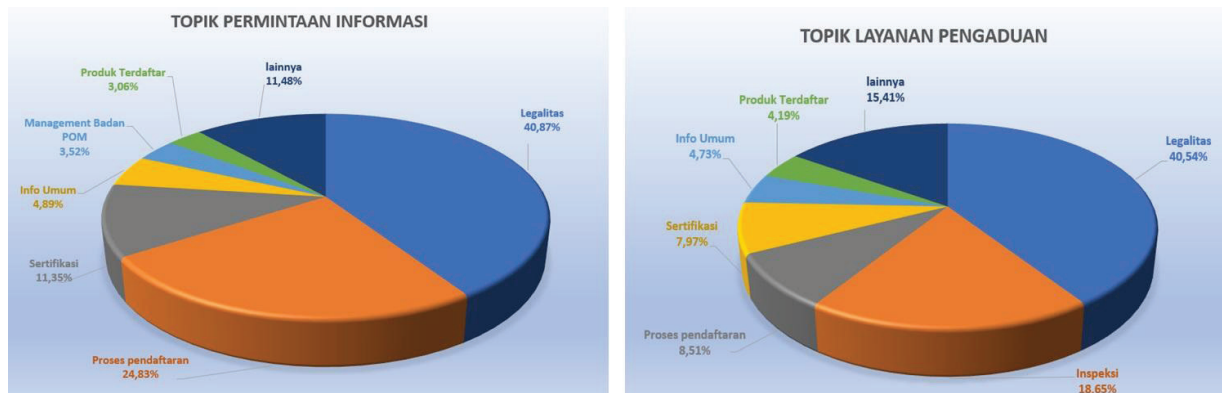
Gambar 24. Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu aplikasi *WhatsApp* sebanyak 4.015 (36,78%) layanan dan langsung sebanyak 3.129 (28,66%) layanan, sementara untuk media pengaduan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yaitu *WhatsApp* sebanyak 108 (29,19%) layanan dan telepon 85 (22,97%) layanan.



Gambar 25. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 5.953 (54,53%) layanan dan kosmetik sebanyak 2.288 (20,96%) layanan. Untuk layanan pengaduan, komoditi yang banyak diadukan yaitu pangan sebanyak 163 (44,05%) layanan dan kosmetik sebanyak 118 (31,89%) layanan.



Gambar 26. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait legalitas sebanyak 8.921 (40,87%) layanan dan proses pendaftaran sebanyak 5.420 (24,83%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi tentang pengajuan perizinan pada *subsiste* e-sertifikasi, informasi umum seperti magang/penelitian,

informasi nomor kontak dan alamat unit di Badan POM, produk terdaftar/legalitas produk, pengujian laboratorium, konsultasi desain kemasan produk, Informasi Nilai Gizi, dan tanggal kedaluwarsa. Untuk layanan pengaduan, topik yang banyak diadukan yaitu tentang legalitas produk sebanyak 300 (40,54%) layanan dan inspeksi seperti pengaduan terhadap produk Obat dan Makanan ilegal ataupun tidak sesuai ketentuan sebanyak 138 (18,65%) layanan.



BAB 7

Digitalisasi Pelayanan Publik

1. BPOM Mobile

Pemerintah sedang berupaya mencapai keterpaduan layanan digital nasional dengan melakukan percepatan transformasi digital sesuai amanat peraturan Presiden No.82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital. Hal ini mendorong Badan POM melakukan percepatan digital transformasi Obat dan Makanan. Salah satu bentuk transformasi digital di Badan POM adalah sistem informasi BPOM *Mobile*.



Gambar 27. Fitur BPOM *Mobile*

Pada tahun 2024, BPOM *mobile* hadir dengan penambahan informasi bagi masyarakat yaitu informasi sirop aman dan penjelasan publik. Dengan penambahan informasi ini diharapkan masyarakat tidak perlu mengunduh aplikasi terpisah guna memperoleh informasi sekaligus mendukung upaya pencapaian *One App Mobile* Badan POM. Aktivitas BPOM *Mobile* selama triwulan I sebagai berikut:



Gambar 28. Aktivitas BPOM *Mobile* s.d Triwulan I tahun 2024

2. Aplikasi *Gateway Online Single Submission* dan Pajak

Sistem *Gateway Online Single Submission* (OSS) dan Pajak merupakan penunjang integrasi data antara Badan POM dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Dengan terintegrasinya aplikasi layanan publik Badan POM dengan OSS RBA, maka BKPM bersama Badan POM secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi integrasi tersebut. Sebagai dasar penarikan produk beredar yang telah mendapatkan perizinan melalui OSS RBA, Badan POM melakukan pertemuan bersama BKPM untuk mengetahui konsep pengawasan sesuai PP No. 5 Tahun 2021 yang diimplementasikan pada OSS RBA. Pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan monitoring integrasi aplikasi Badan POM dengan OSS dengan hasil sebagai berikut:

- BKPM mengusulkan agar pengajuan sertifikasi/izin edar dari pengguna yang tidak mempunyai NIB dengan tujuan tidak untuk komersil, agar diterbitkan sertifikat/izin edar menggunakan kop Badan POM dan ditandatangani oleh pejabat Badan POM.
- Format sertifikat OSS-RBA *bilingual* sudah difasilitasi pada 3 PBUMKU, yaitu Sertifikat CPOTB, Sertifikat CPOTB Bertahap, dan Sertifikat CPKB.

- c. BKPM akan membuat mekanisme pemberitahuan jika terdapat pelaksanaan *maintenance* pada sistem OSS-RBA.
- d. PB-UMKU dengan skema *makloon* yang selama ini menjadi *pending issue* dalam integrasi Sistem OSS-RBA dengan Pelayanan Publik Badan POM akan difasilitasi oleh BKPM pada tahun 2024 dengan pemberian *flag* pada data yang dikirimkan oleh sistem OSS-RBA.
- e. Modul pencabutan/pembatalan PB-UMKU dengan mekanisme integrasi akan segera dikembangkan pada tahun 2024. Untuk sementara, pencabutan/pembatalan UMKU masih dilakukan secara manual dengan bersurat resmi ke Deputy Pengendalian Penanaman Modal BKPM.

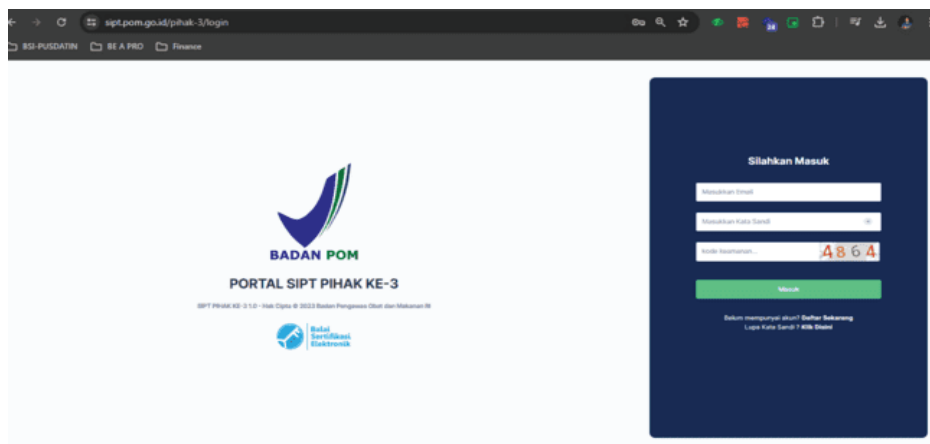
3. Pengembangan Data dan Informasi pada Badan POM *Command Center*

Badan POM *Command Center* (BCC) merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh institusi dalam menjalankan *Crisis Management* atau *Business Continuity Management*. BCC memiliki fungsi untuk mendukung tindakan tanggap darurat, *action plan* untuk perbaikan dan pemulihan, serta langkah penyediaan informasi publik. Sejak direvitalisasi pada tahun 2017, BCC telah menyediakan *dashboard* informasi dan memuat data strategis dari beberapa unit kerja di Badan POM secara komprehensif melalui visualisasi grafik, tabel, dan peta. Pada tahun 2024 akan dilakukan penambahan muatan informasi pada BCC sehingga semua data strategis yang dimiliki oleh Badan POM dapat diakses oleh pimpinan secara langsung dan terpadu melalui BCC. *Dashboard* informasi baru yang telah dikembangkan sampai dengan triwulan I tahun 2024 yaitu:

- a. *Dashboard* Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan POM
Modul Profil, Evaluasi Pembayaran, Jasa, Permohonan, serta Pembayaran *Billing* dan *Invoice*
- b. *Dashboard* Peta Persebaran KIE
Modul KIE Provinsi, KIE Kabupaten/Kota, dan KIE Eselon 1

4. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) sebagai sarana pencatatan dan pelaporan hasil pengawasan Obat dan Makanan terus disempurnakan sesuai dengan arah kebijakan pengawasan terbaru. Pada triwulan I tahun 2024, telah dilakukan implementasi Portal Layanan Pihak Ketiga untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pengujian sampel di seluruh laboratorium milik UPT Badan POM.



Gambar 29. Tampilan Login Portal SIPT

Untuk memudahkan proses evaluasi kinerja UPT dalam mengawal pengawasan Obat dan Makanan, SIPT telah terintegrasi dengan SIMETRIS RHPK. Pengembangan di dalam aplikasi SIPT juga terus dilakukan antara lain dengan pengembangan *Dashboard* SIPT, pengembangan Modul Pelaporan Intensifikasi Pengawasan Pangan, dan penyempurnaan *Tools* Money Regionalisasi Laboratorium.

5. SMARTPOM

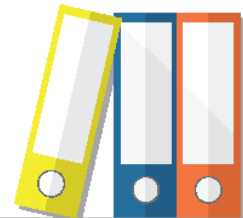
Peningkatan kualitas pengawasan di daerah serta peningkatan peran Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyediakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan atau yang biasa disebut DAK Nonfisik POM. Pengalokasian DAK Nonfisik POM yang ditujukan kepada Pemda bertujuan untuk membantu meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Untuk mempermudah tahapan perencanaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan yang menggunakan alokasi anggaran DAK Nonfisik POM, Badan POM mengembangkan aplikasi SMARTPOM. Pada triwulan I tahun 2024, sudah dilakukan pembahasan penyesuaian menu DAK Nonfisik POM Tahun 2024 pada aplikasi SMARTPOM.

6. Layanan *Helpdesk* Pusdatin

Aplikasi *Help* Pusdatin (ITSM) merupakan aplikasi pengelolaan katalog layanan Pusdatin yang menjadi media komunikasi antara pegawai Badan POM di seluruh Indonesia sebagai pengguna layanan dengan Pusdatin sebagai pengelola layanan. Dalam aplikasi ini terdapat 2 macam layanan yang disediakan yaitu permohonan dan pengaduan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi aplikasi *Help* Pusdatin pada periode triwulan I tahun 2024, total pengajuan permohonan dan pengaduan adalah sebanyak 2.124 layanan. Rata-rata waktu tindak lanjut yaitu 2 – 3 hari untuk permohonan dan 3 – 4 hari untuk pengaduan.

704 Jumlah Permohonan	115 Permohonan Tiket Terbik	20 Permohonan Dalam Proses	532 Permohonan Selesai	37 Permohonan Ditolak
1438 Jumlah Pengaduan	60 Pengaduan Tiket Terbik	232 Pengaduan Dalam Proses	1129 Pengaduan Selesai	5 Pengaduan Ditolak

Gambar 30. *Dashboard* Data Pengajuan pada Layanan *Helpdesk* Pusdatin





BAB 8

Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

1. Penyusunan Regulasi

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, telah ditetapkan 4 Peraturan Badan POM, 13 Keputusan/Surat Edaran Kepala Badan POM, dan 17 Rumusan Perjanjian.

Judul Peraturan Badan POM

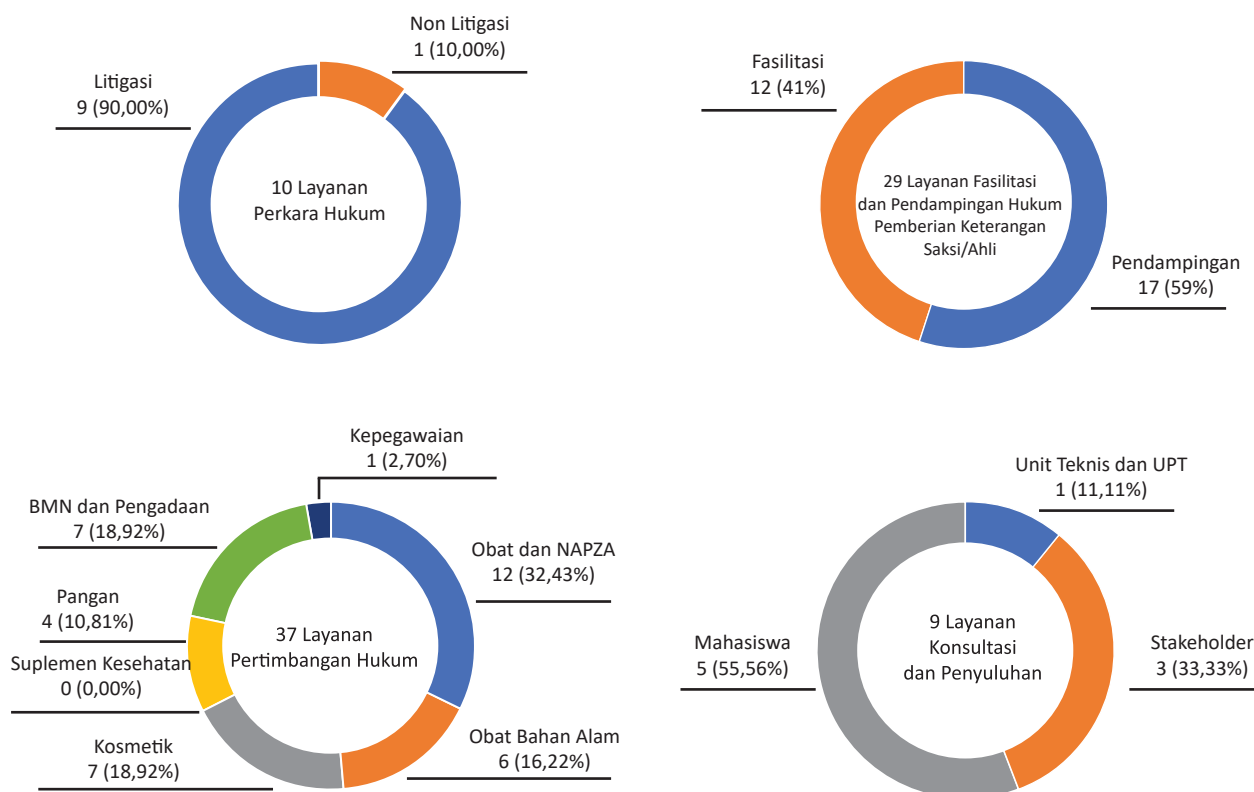
1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisis Hasil Pengawasan dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.



2. Layanan Advokasi Hukum

Setiap instansi pemerintah perlu mempertimbangkan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi

Salah satu aspek hukum adalah layanan advokasi hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum. Jumlah dan jenis layanan advokasi hukum yang sudah dilakukan oleh Badan POM sampai dengan triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 24.



Gambar 31. Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan I Tahun 2024

BAB 9

Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

Badan POM melakukan penataan organisasi untuk terciptanya organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan nasional. Penataan organisasi merupakan proses evaluasi terhadap struktur organisasi Badan POM *existing* baik pada organisasi induk maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam rangka penataan dan penguatan organisasi unit kerja Pusat, telah dilakukan pembahasan usulan Penataan Organisasi Badan POM Tahun 2024 tanggal 14 dan 16 Februari 2024 bersama pakar bidang kelembagaan serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tanggal 21 Februari 2024.

Pada pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terhadap usulan penataan organisasi Badan POM meliputi:

- a. Usulan penataan organisasi Deputi disesuaikan berdasarkan Peta Proses Bisnis Utama Badan POM.
- b. Usulan penataan organisasi Sekretariat Utama mempertimbangkan pemerataan beban kerja dan pengelompokan kesesuaian rumpun fungsi antar Biro.
- c. Usulan pembentukan Inspektorat III pada Inspektorat Utama yang berfokus pada fungsi investigasi dan upaya pencegahan korupsi.

Selain itu, Badan POM telah menetapkan Keputusan Kepala Badan POM No. 67 Tahun 2024 tentang Pembinaan Kinerja Pusat dan UPT pada Badan POM sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan kinerja Pusat dan UPT pada Badan POM. Ketentuan ini mencabut Keputusan Kepala Badan POM No. 49 Tahun 2023 tentang Pembinaan

Kinerja Pusat dan UPT pada Badan POM. Subtansi perubahan adalah penyesuaian atas peningkatan 8 Loka POM menjadi Balai POM, pembentukan 3 Loka POM, dan perubahan lokasi kedudukan 2 Loka POM sesuai Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Badan POM.

2. Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang telah dilaksanakan tahun 2023 melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/79/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024, Indeks RB Badan POM tahun 2023 mengalami kenaikan dari 84,51 menjadi 89,12 dengan kategori “A-” (Memuaskan) dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Hasil Penilaian Indeks RB Badan POM Tahun 2023

No	Penilaian	Bobot	Nilai
1	RB General	100	82,58
2	RB Tematik	10	6,54
Indeks RB		110	89,12

Tindak lanjut dari perolehan indeks RB Badan POM yang meningkat setiap tahun, Badan POM mengusulkan penyesuaian tunjangan kinerja pegawai Badan POM menjadi 100% melalui surat Plt. Kepala Badan POM kepada Menteri PANRB Nomor B-KU.02.03.1.2.02.24.52 tanggal 6 Februari 2024 hal Usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan POM Tahun 2024. Selanjutnya, kegiatan audiensi Plt. Kepala Badan POM dengan Menteri PANRB telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024.

3. Tata Laksana

a. Evaluasi Sistem Manajemen di Badan POM

Badan POM telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001 sejak tahun 2012. Seiring dengan pertumbuhan organisasi, lingkup sistem manajemen terus berkembang baik dalam hal jenis sistem manajemen maupun unit organisasi yang menerapkan. Dalam rangka optimasi sistem manajemen, perlu dilakukan berbagai upaya yang diawali dengan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen yang telah berjalan.



Pembahasan dalam rangka evaluasi dilakukan pada 11 Januari 2024 secara luring dan daring dengan melibatkan narasumber dari BSN, narasumber dari PT Sucofindo, Tim Koordinator Auditor Internal, Tim Koordinator Manajemen Representatif dan perwakilan UPT Badan POM. Berdasarkan hasil pembahasan perlu adanya pendekatan pelaksanaan sistem manajemen secara terintegrasi (*Integrated Management System*) yang meliputi 1) integrasi proses (*integrated process*), 2) integrasi risiko (*integrated risk*), dan 3) integrasi audit (*integrated audits*).

b. Tinjau Ulang Proses Bisnis Badan POM

Tinjau ulang proses bisnis telah dilaksanakan mulai bulan Januari dan akan terus berlanjut sampai dengan April 2024. Tinjau ulang dilaksanakan terhadap beberapa aspek meliputi peta proses bisnis, peta subproses bisnis, peta hubungan proses bisnis, peta lintas fungsi, dan SOP makro di lingkungan Badan POM. Pembahasan dilakukan secara luring dan daring dengan melibatkan Unit Kerja Pusat dan perwakilan UPT yang terkait. Hasil pembahasan diarahkan untuk merujuk pada prinsip SERA, yaitu penyederhanaan proses (*Simplification-S*), penghilangan proses yang tidak perlu (*Elimination-E*), pembuatan proses yang sama sekali baru (*Reengineering-R*), dan pengautomatisasian (*Automation-A*) dan akan disosialisasikan pada triwulan II tahun 2024.

c. Peningkatan Kapasitas Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memberikan tanggung jawab kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif di instansi masing-masing. Di samping penyelenggaraan SPIP, Badan POM juga menerapkan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 pada seluruh unit kerja Badan POM.

Sistem Manajemen Mutu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja demi tercapainya birokrasi yang efektif dan efisien. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dan penerapan Sistem Manajemen Mutu Badan POM, telah dilakukan pembahasan yang intensif yang bertujuan untuk pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern dengan Sistem Manajemen

Mutu. Dengan pembahasan tersebut maka ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM No. 65 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Berbasis Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu di Lingkungan Badan POM.



Dalam rangka sosialisasi dan peningkatan kapasitas pengendalian intern Badan POM maka dilaksanakan kegiatan pada 13 Maret 2024 secara luring dan daring dengan melibatkan Narasumber dari BPKP, Tim Koordinator Auditor Internal, Tim Koordinator Manajemen Representatif, perwakilan Unit Kerja Pusat dan perwakilan UPT Badan POM. Disamping sebagai forum sosialisasi untuk peningkatan kapasitas pengendalian intern, kegiatan juga menjadi forum untuk pembahasan dan penyediaan dokumen dalam penerapan sistem manajemen terintegrasi.

d. Finalisasi Manual Sistem Manajemen Terintegrasi Badan POM

Dalam rangka perbaikan berkelanjutan penerapan sistem manajemen, dilakukan langkah-langkah pemeliharaan dan tinjau ulang Manual Organisasi Badan POM melalui pelaksanaan tinjau ulang Manual Sistem Manajemen Badan POM dengan mengintegrasikan klausul-klausul pada SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan SNI ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan sistem manajemen lainnya ke dalam Manual Sistem Manajemen Terintegrasi. Hal ini sebagai langkah awal penyediaan dokumen penerapan sistem manajemen terintegrasi.

Tinjau ulang dan pembahasan dilakukan dalam beberapa kali pembahasan yang intensif dan dilakukan finalisasi pada 26 Maret 2024 secara luring dan daring dengan melibatkan Tim Koordinator Auditor Internal, Tim Koordinator Manajemen Representatif, dan perwakilan UPT Badan POM.



BAB 10

Kerjasama Internasional

1. Kerja sama Badan POM dan USP: Memperkuat Standar Kualitas Produk Farmasi melalui Peningkatan Kapasitas Regulatori Badan POM



Plt. Kepala Badan POM, Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt, M. Pharm, MARS menerima kunjungan dari CEO USP, Ronald T. Piervincenzi, Ph.D pada tanggal 25 Januari 2024. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kolaborasi antara Badan POM dan USP untuk memperkuat rantai pasok produk medis melalui standar kualitas dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai landasan kegiatan kerja sama ke depan.

USP adalah organisasi nirlaba berbasis ilmu pengetahuan yang berkantor pusat di Amerika Serikat. USP mengembangkan standar kualitas obat-obatan, suplemen makanan, dan bahan makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat global. Standar USP digunakan di lebih dari 175 negara dan diacu oleh USFDA untuk obat-obatan yang diimpor atau dipasarkan di AS. USP akan bekerja sama dengan Badan POM untuk memberikan dukungan teknis yang dibutuhkan, termasuk pengajuan WLA Badan POM. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat standar kualitas dan meningkatkan layanan Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan.

2. Pertemuan Badan POM dengan CoRE Duke-NUS dan Asian Development Bank

Badan POM telah melakukan pertemuan dengan *Centre of Regulatory Excellence* (CoRE) Duke-NUS Singapura dan *Asian Development Bank* (ADB) di sela-sela kunjungan CoRE dan ADB dalam rangka peresmian *Vaccine Collaborating Centre* (VOLARE) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 26 Januari 2024 di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kerja sama dan menjajaki dukungan yang dapat diberikan oleh CoRE dan ADB terhadap peningkatan kapasitas regulatori Badan POM.



Pertemuan dengan CoRE Duke-NUS dan ADB dipimpin oleh Plt. Kepala Badan POM didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA, Direktur Standardisasi ONPPZA, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kepala PPSDM, serta perwakilan dari unit kerja di Kedeputan 1, PPPOMN, dan Pusakom. Hadir dari pihak CoRE yaitu *Executive Director*, Prof. John W. Lim beserta tim, dan dari ADB yaitu *Director of Human and Social Development Sector Office*, Dr. Patrick Osewe dan Tim.

Badan POM juga menyampaikan bahwa *draft* MoU antara Badan POM dan CoRE saat ini tengah dalam tahap *review* akhir dan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri, termasuk *draft* dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya *draft* dimaksud akan disampaikan kepada CoRE untuk *final review*.

Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dimaksud, Badan POM akan menyusun proposal untuk beberapa kegiatan yang akan disampaikan kepada CoRE dan ADB, serta menyampaikan hasil *self-assessment* yang telah dilakukan oleh Badan POM beserta IDP WHO, juga dokumen pendukung lainnya dalam rangka proses pengajuan WLA.

BAB 11

Sumber Daya Manusia

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan I tahun 2024 telah dilaksanakan pengumuman seleksi administrasi untuk Seleksi Terbatas dari PNS Internal di Lingkungan Badan POM 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN. Pengumuman seleksi tersebut dapat diakses melalui *link* <https://birosdm.pom.go.id/seleksi-terbatas>.

Total pegawai di Badan POM sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebanyak 5.391 pegawai yang terdiri dari 4.879 orang PNS, 511 PPPK, dan 1 POLRI/Jaksa. Pegawai di Badan POM terdiri dari 1.523 orang (28,26%) laki-laki dan 3.867 orang (71,74%) perempuan. Sedangkan berdasarkan tipe kepegawaian, pegawai Badan POM terdiri dari 4.710 orang (87,38%) Fungsional, 517 orang (9,59%) Pelaksana, dan 163 orang (3,02%) Struktural.

2. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung program sertifikasi dan uji kompetensi, pengembangan kompetensi, pengelolaan pengetahuan organisasi, serta pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), selama triwulan I tahun 2024 Badan POM mengembangkan 8 aplikasi dengan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi sebagai berikut:

a. UJIPEDIA

LSP Badan POM selaku unit pelaksana sertifikasi melakukan sertifikasi kompetensi di bidang keamanan pangan bagi Penyuluh Keamanan Pangan Pertama (PKP Pertama) dan Inspektur Muda Keamanan Pangan (*District Food Inspector Junior*) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan internal BPOM dengan pelaksanaan menggunakan aplikasi UJIPEDIA (<https://lspbpm.com>). Hasil pemanfaatan aplikasi UJIPEDIA dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi UJIPEDIA s.d. Triwulan I Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah	Kompeten		Belum Kompeten	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama	113	113	100%	0	0%
2.	Sertifikasi Kompetensi DFI Junior	119	117	98%	2	2%
Total		232	230	99%	2	1%

b. PENKOMTEK

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi, pemberian umpan balik dan monitoring penggunaan aplikasi penilaian kompetensi teknis (PENKOMTEK) (<https://penkomtek.pom.go.id/>) sampai dengan triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi PENKOMTEK s.d. Triwulan I Tahun 2024

No.	Keterangan	Periode	Jumlah Peserta yang diterima	Jumlah Peserta yang ditolak
1.	Pemetaan Kompetensi	Februari	110	0
2.	Uji Kompetensi	Februari	119	18
3.	Pemetaan Kompetensi	Maret	25	0
Total			254	18



c. SIPENATEMANKU

Penilaian kompetensi yang selama ini dilakukan yaitu Uji Kompetensi dan Pemetaan kompetensi secara *online* dengan menggunakan Aplikasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, serta Psikotes Online (SIPENATEMANKU) (link <https://asesmen.pom.go.id>). Hasil penilaian kompetensi sampai dengan triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi SIPENATEMANKU s.d. Triwulan I Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Peserta		Waktu Pelaksanaan
		SJT	AC	
1	Ukom Pengangkatan Kembali	-	1	10 Januari 2024
2	Ukom Pengangkatan Kembali	-	1	5 Februari 2024
3	Pemetaan BBPOM di Medan, Loka POM di Kab. Toba, dan Loka POM di Kota Tanjung Balai	64	-	29 Januari 2024
		-	13	12 Februari 2024
4	Pemetaan BPOM di Jambi dan Loka POM di Kab. Bungo	53	-	29 Januari 2024
		-	3	19 Maret 2024
5	Pemetaan BPOM di Pangkal Pinang dan Loka POM di Kab. Belitung	38	-	29 Januari 2024
		-	2	19 Maret 2024
6	Pemetaan Pusat Batch 1	55	-	27 Maret 2024
7	Ukom Batch 1	56	-	23 Februari 2024
		-	20	22-29 Februari 2024

d. ERUDITIO

Badan POM juga menerbitkan jurnal terkait pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia melalui aplikasi ERUDITIO (<https://eruditio.pom.go.id/index.php/home>). Jurnal dan artikel yang sudah diterbitkan pada periode tahun 2020-2023 berjumlah 6 jurnal dan 38 artikel. Progres yang sudah diperoleh pada triwulan I tahun 2024 yaitu 1 jurnal dan 8 artikel sudah dalam proses *copyediting*.

e. CMC

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, sudah terlaksana 15 kegiatan *coaching* dan 9 kegiatan *mentoring* melalui aplikasi CMC Badan POM (<https://ppsdm.pom.go.id/panel/cmc>).

f. SIMPHONI

Badan POM memiliki aplikasi SIMPHONI yang merupakan *platform knowledge management*. Aplikasi SIMPHONI memungkinkan pegawai atau unit kerja di Badan POM untuk *sharing* data, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau unit kerja lain. Sampai dengan triwulan I 2024, terdapat 11 unit kerja yang sudah membagikan 126 publikasi data/pengetahuan/informasi pada aplikasi SIMPHONI (<https://ppsdm.pom.go.id/simponi>).

g. IDEAS

Aplikasi *Integrated Development and Training Information System* (IDEAS) merupakan *platform* pengembangan kompetensi digital terintegrasi di Badan POM. Aplikasi tersebut memiliki fitur *online shopping training* atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara *online* kapanpun dan di manapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Keunggulan lain dari IDEAS berupa penerbitan sertifikat *online* di mana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id>. Data pemanfaatan aplikasi IDEAS selama triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 8.

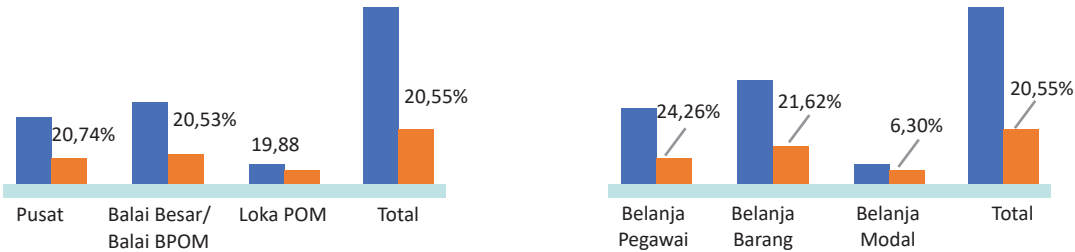
Tabel 8. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi IDEAS s.d. Triwulan I Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Pegawai BPOM yang belajar IDEAS	2.124
2	ASN Non BPOM yang belajar IDEAS	5
3	Pelaku usaha yang belajar IDEAS	2
4	Akun eksternal yang belajar IDEAS	1
5	Modul terbaru yang diupload	16 Modul
6	Webinar yang dilaksanakan	11 Webinar

BAB 12

Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Total anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.354.321.946.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 42 Balai Besar/Balai POM dan 31 Loka POM. Realisasi anggaran per Triwulan I tahun 2024 sebesar, Rp483.927.544.170 (20,55%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp176.701.215.541 realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp272.133.329.644,dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp35.092.998.985.



Gambar 32. Realisasi Anggaran s.d Triwulan I 2024

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
Pusat	852.096.226.000	176.701.215.541	20,74%
Balai Besar/ Balai POM	1.325.704.712.000	272.133.329.644	20,53%
Loka POM	176.521.008.000	35.092.998.985	19,88%
Total	2.354.321.946.000	483.927.544.170	20,55%

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	804.240.516.000	1.247.469.682.000	302.611.748.000	2.354.321.946.000
Realisasi	195.102.388.696	269.756.909.169	19.068.246.305	483.927.544.170
%	24,26%	21,62%	6,30%	20,55%



BAB 13

Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2024. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per bulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Maret tahun 2024 sebagaimana terlampir pada buku ini.



Penutup

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta continuous Improvement.



LAMPIRAN I

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN VERSI RENSTRA TAHUN 2024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPOM
S.D TW Triwulan I 2024

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
	BPOM					
		Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83	Indeks	Akhir Tahun	
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	%	97.07	100.07%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	87	%	89.70	103.10%
		Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	86	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96.5	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	92.5	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88.05	Indeks	Akhir Tahun	
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92	%	94.26	102.46%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.6	%	83.58	98.79%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	72.2	%	80.66	111.72%
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.6	%	95.72	100.13%
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	4.7	Indeks	Akhir Tahun	
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	51	%	Akhir Tahun	
		Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuaistandar	92	%	Akhir Tahun	
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Makanan	93	%	Akhir Tahun	
		Indeks RB BPOM	89.5	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai AKIP BPOM	83	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase kerjasama yang efektif	90	%	Akhir Tahun	
		Indeks Profesionalitas ASN BPOM	90.2	Indeks	Akhir Tahun	
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83	%	Akhir Tahun	
		Indeks SPBE BPOM	4.1	Indeks	Akhir Tahun	
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	87.96	%	Akhir Tahun	
		Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	84.38	%	Akhir Tahun	
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	Akhir Tahun	
		Nilai kinerja anggaran BPOM	94.4	Nilai	44.08	46.69%
A.	Program Pengawasan Obat dan Makanan					
		Indeks Pengawasan Obat	91	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89	Indeks	Akhir Tahun	
		Persentase UMKM Obat Bahan Alam yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	96.7	%	Akhir Tahun	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Indeks Pengawasan Makanan	86	Indeks	Akhir Tahun	
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	359	Kab/Kota	Akhir Tahun	
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	51	%	Akhir Tahun	
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	94.75	%	95.60	100.90%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	86	%	88.40	102.79%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91	%	87.48	96.13%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	81.5	%	81.34	99.80%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	%	80.72	89.69%
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	86	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	92	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	83	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91.29	Indeks	Akhir Tahun	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	95	%	92.37	97.23%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	75	%	62.59	83.45%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	97	%	79.23	81.68%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	70	%	61.03	87.18%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	71	%	75.25	105.98%
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.51	Indeks	Akhir Tahun	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	%	22.98	28.37%
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	97	Nilai	92.48	95.34%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	3400	Sekolah	Progress 15,08%	
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	1105	Desa	Progress 14,58%	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	450	Pasar	Progress 17,30%	
		Persentase sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	22.38	22.38%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	26.05	26.05%
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	81	%	18.72	23.11%
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan laboratorium/GLP	91	%	Akhir Tahun	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	90	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	92.1	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	99	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	91	%	100.00	109.89%
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	92.5	%	89.30	96.54%
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	100	%	Akhir Tahun	
		Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	92.9	%	Akhir Tahun	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	92	%	75.00	81.52%
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	3	Persen	2.25	75.00%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	89.13	Persen	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	89.35	Persen	Akhir Tahun	
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3	Jaringan	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.74	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase laporan informasi dan laporan intelijen UPT yang sesuai prosedur	80	%	Akhir Tahun	
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	88	%	90.14	102.43%
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	88	%	75.00	85.23%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	86	%	75.00	87.21%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	92	%	75.00	81.52%
1.4	Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan obat bahan alam dan Suplemen Kesehatan	91.75	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4.9	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	92.2	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	92.09	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	78.5	%	81.32	103.59%
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tep	88	%	91.32	103.77%
		Persentase laporan keamanan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	98.5	%	98.65	100.15%
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	98.5	%	100.00	101.52%
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang disel	92	%	92.32	100.35%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti	81	%	81.08	100.10%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	89	%	90.00	101.12%
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	72	%	Akhir Tahun	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	100	%	100.00	100.00%
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan olahan	87.5	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4.55	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	3	Indeks	2.00	66.67%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	90.81	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	92	Indeks	Akhir Tahun	
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar	350	Kab/Kota	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	95	%	76.68	80.72%
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	72	%	Akhir Tahun	
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	98.3	%	100.00	101.73%
		Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	82.76	87.12%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase Koordinasi pengawasan produksi pangan fortifikasi yang dilaksanakan	90	%	11.40	12.67%
		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	95	%	Akhir Tahun	
		Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan SJKPMP	25	%	Akhir Tahun	
		Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan masyarakat terhadap Pengawasan produksi yang diberi	94.6	%	95.80	101.27%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	100	%	78.00	78.00%
1.6	Pengawasan Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	87	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.65	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	87.41	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	93.19	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.33	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas sektor	85	%	87.50	102.94%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	70.05	%	70.10	100.07%
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89	%	91.71	103.04%
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	%	96.95	105.38%
		Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	98	%	98.68	100.69%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	94	%	94.30	100.32%
		Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	81	%	81.02	100.02%
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	86	%	Akhir Tahun	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100	%	75.00	75.00%
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan publik di bidang distribusi obat,	93.5	%	Akhir Tahun	
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4.65	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	3	%	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Dit.Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	87.21	%	65.10	74.65%
		Indeks RB Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	93.33	%	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.94	%	Akhir Tahun	
		Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	81	Indeks	Akhir Tahun	
		Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	97	%	100.00	103.09%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	95.5	%	96.67	101.23%
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	96	%	97.01	101.05%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	88	%	83.23	94.58%
		Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	85	%	8.08	9.51%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	100	%	100.00	100.00%
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam label dan iklan	55.2	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan Obat dan NPP	93.5	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, p	92	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, P	4.7	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, P	91.26	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prek	95.43	%	Akhir Tahun	
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60800	Label dan Iklan	15013.00	24.69%
		Jumlah permohonan ekspor impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu	18300	Permohonan	6435.00	35.16%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	89.68	Nilai	Akhir Tahun	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	80.2	%	82.53	102.91%
		Persentase laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat dan NPP yang ditindaklanjuti	88	%	39.88	45.32%
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	78	%	69.85	89.55%
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	93.91	%	0.00	0.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, N	98	%	100.00	102.04%
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	90	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4.85	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	90.56	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	91.95	Indeks	Akhir Tahun	
		Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Pengawasan Post Market sesuai Standar	350	Kab/Kota	Akhir Tahun	
		Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) Peredaran	3000	sarana	2364.00	78.80%
		Jumlah Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan tepat waktu	67000	Permohonan	18921.00	28.24%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.25	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase Instansi Pemerintah yang berperan aktif dalam Pengawasan Makanan	95	%	Akhir Tahun	
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai Standar	96.5	%	99.63	103.24%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase Pelaku Usaha dan Masyarakat yang Meningkatkan Pengetahuannya Terhadap Implementasi Peraturan	87.7	%	93.21	106.28%
		Persentase UPT BPOM yang Melakukan Pengawasan sesuai Standar	84.1	%	Akhir Tahun	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	95	%	80.00	84.21%
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	91	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pelayanan Publik	4.85	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang optimal	3	Indeks	2.00	66.67%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	91.22	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	94.1	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.75	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi	94	%	19.23	20.46%
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	80	%	60.00	75.00%
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, obat, produk biologi dan sarana k	85	%	70.00	82.35%
		Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persy	76	%	50.00	65.79%
		Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	77.2	%	100.00	129.53%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat baru yang diterbitkan keput	85	%	72.92	85.79%
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	100	%	11.11	11.11%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	100	%	95.00	95.00%
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	87	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4.9	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	91.5	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	97	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	97.51	102.64%
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	86	%	52.09	60.57%
		Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	91	%	54.84	60.26%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	99.6	%	100.00	100.40%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100.00	100.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	100	%	75.00	75.00%
1.12	Registrasi Obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	90.75	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat	4.8	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	92.54	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	91.3	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.96	Nilai	Akhir Tahun	
		Persen pengaduan/keluhan/ masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	100	%	100.00	100.00%
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	82	%	77.80	94.88%
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	%	100.00	100.00%
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	78	%	66.58	85.36%
		Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	90	%	87.38	97.09%
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	90	%	50.00	55.56%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	100	%	69.23	69.23%
1.13	Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmeti	89.5	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan P	4.85	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	91.74	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	93.14	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.55	Nilai	Akhir Tahun	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan	90	%	94.95	105.50%
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisi	90	%	90.29	100.32%
		Persentase keputusan registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang disel	83.5	%	87.97	105.35%
		Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93	%	77.52	83.35%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Pralitik/KI	82	%	70.15	85.55%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan	90	%	73.87	82.08%
		Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	100	%	75.00	75.00%
1.14	Standardisasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang Standardisasi Obat Bahan Alam, Supleme	90.25	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.6	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.45	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesional ASN Direktorat Standardisasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.14	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.51	Indeks	Akhir Tahun	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.7	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Bahan Alam, Suplemen Kese	99	%	100.00	101.01%
		Persentase sosialisasi standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada	95	%	78.95	83.11%
		Persentase standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan y	100	%	42.00	42.00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan	100	%	100.00	100.00%
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	85.68	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4.9	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	91.6	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86.94	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	96	%	60.00	62.50%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan te	95	%	100.00	105.26%
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	92	%	95.35	103.64%
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	97	%	35.30	36.39%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	%	Akhir Tahun	
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang standardisasi ONPPZA	85.5	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	93.79	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA	4.5	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	3	Indeks	2.75	91.67%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	90.35	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	91.79	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.8	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholder yang efektif	95	%	Akhir Tahun	
		Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	95.5	%	46.76	48.96%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100	%	92.00	92.00%
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	91.75	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	4.9	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	91.65	Indeks	Akhir Tahun	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92.6	Indeks	Akhir Tahun	
		Jumlah Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	260	Kader/ fasilitator	70.00	26.92%
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	380	Kab/Kota	17.50	4.61%
		Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	980	Kader/ fasilitator	780.00	79.59%
		Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	574	Pemda	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman	74	%	Akhir Tahun	
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	40	%	20.00	50.00%
		Persentase kader keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan makanan	99.2	%	Akhir Tahun	
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	90	%	Akhir Tahun	
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	96	%	Akhir Tahun	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	94	%	Akhir Tahun	
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	96.25	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4.95	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	90.79	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB PPPOMN	91.89	Indeks	Akhir Tahun	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Nilai AKIP PPOMN	85.25	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	93.23	Nilai	48.10	51.59%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.53	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100	%	27.49	27.49%
		Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100	%	91.44	91.44%
		Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	100	%	86.00	86.00%
		Persentase laboratorium Balai Besar / Balai POM sesuai standar Kemampuan Laboratorium	91.18	%	Akhir Tahun	
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	100	%	92.72	92.72%
		Persentase Pemenuhan grand desain penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	40	%	32.50	81.25%
		Persentase Pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	87.96	%	87.17	99.10%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	%	Akhir Tahun	
		Persentase sampel Obat yang ditindaklanjuti tepat waktu	98	%	99.01	101.03%
		Persentase Status Akreditasi	100	%	86.00	86.00%
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	3	%	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	86	%	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	68.8	%	Akhir Tahun	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	70	%	71.13	101.61%
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat d	58	%	22.00	37.93%
		Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	92	%	5.41	5.88%
		Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi Laporan Kejadian	70	Indeks	42.86	61.23%
		Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	55	Indeks	Akhir Tahun	
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	90	Indeks	Akhir Tahun	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	92	%	75.00	81.52%
1.20	Analisis Kebijakan di bidang Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	4	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92.2	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82.76	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	89.65	Nilai	45.93	51.23%
		Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	78.8	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	86	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.9	Nilai	Akhir Tahun	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	84.5	%	Akhir Tahun	
		Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100	%	100.00	100.00%
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	98	%	66.81	68.17%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	%	Akhir Tahun	
		Tingkat Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	89	%	91.88	103.24%
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usa	93.75	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4.7	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradi	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Supl	91.44	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	89.2	Indeks	Akhir Tahun	
		Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK,	294	Kader/ fasilitator	55.00	18.71%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	95	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kosmetik yang sesuai standar	100	%	3.55	3.55%
		Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan,	97.11	%	18.71	19.27%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan	85	%	20.00	23.53%
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos	87.5	%	20.00	22.86%
		Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masy	91.67	%	20.00	21.82%
		Tingkat efektivitas KIE OT, Kos, dan SK	99.2	%	98.67	99.47%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan	99	%	24.94	25.19%
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	%	85.09	100.11%
		Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti	80	%	75.09	93.86%
		Persentase Profil Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	%	87.01	102.36%
		Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan	90	%	93.18	103.53%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	78.4	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	86.9	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	2.5	Indeks	3.00	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	90	%	75.00	83.33%
B.	Program Dukungan Manajemen					
		Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	36	Nilai	Akhir Tahun	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	Akhir Tahun	
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	62.25	Nilai	Akhir Tahun	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	96	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Kepuasan Media	77.13	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Opini Publik BPOM	81.00	Indeks	Akhir Tahun	
		Persentase kerjasama yang efektif	90	%	21.38	23.76%
		Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	4.00	Indeks	Akhir Tahun	
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3.89	Indeks	3.89	100.00%
		Indeks kepuasan media	77.13	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks opini publik BPOM	85.1	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Biro Kerja Sama dan Humas	3	Indeks	2.00	66.67%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	85.2	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	86.32	Indeks	Akhir Tahun	
		Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama	2	Negara	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.41	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	88	%	66.96	76.09%
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	%	20.45	22.72%
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.86	%	99.86	100.00%
		Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	90	%	22.30	24.78%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	80	%	70.83	88.54%
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	98.6	%	100.00	101.42%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	100	%	84.00	84.00%
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3.85	Indeks	3.67	95.32%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	3	Indeks	2.25	75.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	88.7	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja	62.25	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	93.23	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	91.9	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	96.15	Nilai	98.68	102.63%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan	200	%	41.83	20.92%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan an	92	%	62.21	67.62%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100	%	25.00	25.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	%	95.00	95.00%
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3.85	Indeks	3.90	101.30%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	95.5	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pelayanan Publik	4.95	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	3	Indeks	2.75	91.67%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	87.71	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	94.04	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Reformasi Hukum	96.4	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	3	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.55	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase advokasi hukum yang ditindaklanjuti	100	%	100.00	100.00%
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.69	%	98.75	99.06%
		Persentase Peraturan Perundang-undangan yang disusun	100	%	16.50	16.50%
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	98	%	Akhir Tahun	
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	Akhir Tahun	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	Akhir Tahun	
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	97	%	97.04	104.17%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	96	%	100.00	104.17%
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	3.5	Indeks	3.50	100.00%
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3.2	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro SDM yang Optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	89.12	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Biro SDM	92.28	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Sistem Merit	0.95	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan		%	Akhir Tahun	
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	80	%	Akhir Tahun	
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	98	%	99.70	101.73%
		Persentase Layanan Kepegawaian Berbasis Digital yang Diimplementasikan Sesuai Perencanaan	94	%	Akhir Tahun	
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	80	%	Akhir Tahun	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	%	88.00	88.00%
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	77	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pelayanan Publik	3.35	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSPDM POM yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN PPSPDM POM	88.64	Indeks	Akhir Tahun	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK	67.14	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	91.7	Indeks	Akhir Tahun	
		Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai Standar	1000	SDM	280.00	28.00%
		Nilai AKIP PPSDM POM	80.5	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM	4.5	Nilai	4.63	102.89%
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4.65	Nilai	4.76	102.37%
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	91.83	Nilai	45.80	49.87%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase kerja sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	100	%	52.94	52.94%
		Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	98.95	%	100.00	101.06%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	%	Akhir Tahun	
		Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK	100	%	28.57	28.57%
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	65.5	%	17.80	27.18%
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	83	%	81.22	97.86%
		Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi	95	%	Akhir Tahun	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	4.6	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	3.5	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	89.63	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86.1	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks SPBE Badan POM	4.1	Indeks	Akhir Tahun	
		Jumlah Data Berbagi Pakai	30	Data	6.00	20.00%
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90.25	Nilai	49.94	55.34%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81	Nilai	75.00	92.59%
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87	Nilai	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.5	Nilai	Akhir Tahun	
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	%	30.00	30.00%
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	98.5	%	98.46	99.96%
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	75	%	58.30	77.73%
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	%	19.80	19.80%
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	100	%	81.17	81.17%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	69.22	%	Akhir Tahun	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	100	%	88.50	88.50%
		Sertifikasi ISO 27001	1	Sertifikat	Akhir Tahun	
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86.3	Nilai	Akhir Tahun	
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat I	86	Nilai	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat I yang optimal	3	Level	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	91.25	%	76.71	84.07%
		Indeks reformasi birokrasi Inspektorat I	86.7	%	Akhir Tahun	
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai evaluasi Kapabilitas APIP	3.6	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3.85	%	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	%	Akhir Tahun	
		Nilai Survei Penilaian Integritas	83.48	%	Akhir Tahun	
		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99.01	%	Akhir Tahun	
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100	%	100.00	100.00%
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100	%	62.50	62.50%
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97.57	%	100.00	102.49%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM	94	%	Akhir Tahun	
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	96	Indeks	93.85	97.76%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	30	Indeks	Akhir Tahun	
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	92	Indeks	92.00	100.00%
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86.3	Nilai	Akhir Tahun	
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat II	86	Nilai	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat II yang optimal	3	Level	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	94.84	%	79.03	83.33%
		Indeks reformasi birokrasi Inspektorat II	86.7	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75	Indeks	Akhir Tahun	
		Nilai evaluasi Kapabilitas APIP	3.6	%	Akhir Tahun	
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3.85	%	Akhir Tahun	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	95.79	%	Akhir Tahun	
		Nilai Survei Penilaian Integritas	83.48	%	Akhir Tahun	
		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99.01	%	Akhir Tahun	
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100	%	100.00	100.00%
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100	Indeks	100.00	100.00%
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97.57	Indeks	100.00	102.49%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM	94	%	Akhir Tahun	
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	96	Indeks	96.92	100.96%

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Capaian s.d TW I 2024	Capaian (%)
		Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	30	%	Akhir Tahun	
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	92	%	75.00	81.52%
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3.81	Nilai	3.54	92.91%
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	90	Nilai	Akhir Tahun	
		Indeks Pengelolaan Aset BPOM	3.42	Indeks	Akhir Tahun	
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	85.9	Persen	Akhir Tahun	
		Indeks RB Biro Umum	90.48	Persen	Akhir Tahun	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	85	Persen	Akhir Tahun	
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	94	Level	Akhir Tahun	
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokol dan kesekretariatan pimpinan	92.5	Persen	91.38	98.79%
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Rencana	100	Indeks	5.00	5.00%
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	95	Indeks	68.67	72.28%
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	100	Indeks	Akhir Tahun	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100	%	75.00	75.00%



LAMPIRAN II

Peringkat Realisasi Anggaran Unit Pusat

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	7,371,062,000	7,371,062,000	2,975,326,891	40.36%	40.36%
2	DIT. STANDARDISASI OT, SK, DAN KOS	6,990,035,000	6,697,994,000	2,602,369,228	37.23%	38.85%
3	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN ONPP	7,959,485,000	7,688,344,000	2,430,200,026	30.53%	31.61%
4	DIT. STANDARDISASI ONPPZA	8,581,043,000	8,186,009,000	2,303,535,866	26.84%	28.14%
5	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI ONPP	11,356,263,000	10,917,185,000	3,022,391,674	26.61%	27.68%
6	DIT. PENGAWASAN OT DAN SK	12,382,354,000	12,230,987,000	3,236,106,453	26.13%	26.46%
7	DIT. PMPU OT, SK, DAN KOS	12,321,062,000	11,697,408,000	3,066,870,767	24.89%	26.22%
8	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	8,892,210,000	8,592,210,000	2,239,017,415	25.18%	26.06%
9	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	10,485,788,000	10,107,503,000	2,560,498,011	24.42%	25.33%
10	DIT. REGISTRASI OBAT	11,625,179,000	11,291,433,000	2,801,201,912	24.10%	24.81%
11	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	223,250,916,000	222,718,317,000	54,054,590,184	24.21%	24.27%
12	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	21,247,974,000	20,329,370,000	4,750,264,459	22.36%	23.37%
13	DIT. REGISTRASI OT, SK, DAN KOS	11,421,844,000	10,999,019,000	2,470,066,953	21.63%	22.46%
14	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	14,959,391,000	14,289,702,000	3,187,018,414	21.30%	22.30%
15	DIT. SIBER OBAT DAN MAKANAN	10,742,329,000	10,202,082,000	2,270,858,734	21.14%	22.26%
16	DIT. CEGAH TANGKAL	9,346,342,000	8,892,337,000	1,917,038,693	20.51%	21.56%
17	INSPEKTORAT I	24,325,187,000	23,742,395,000	5,089,699,557	20.92%	21.44%
18	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	16,329,513,000	15,516,353,000	3,299,987,051	20.21%	21.27%
19	DIT. PMPU PANGAN OLAHAN	17,440,050,000	16,690,211,000	3,422,298,481	19.62%	20.50%
20	DIT. PENGAWASAN KMEI NPPZA	14,943,811,000	14,229,163,000	2,818,728,445	18.86%	19.81%
21	PUSDATIN	52,237,802,000	49,991,593,000	9,879,380,253	18.91%	19.76%
22	PPPOMN	79,135,826,000	76,368,721,000	14,953,520,847	18.90%	19.58%
23	DIT. PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN	16,170,634,000	15,460,414,000	2,949,746,478	18.24%	19.08%
24	PPSDM	54,638,513,000	52,323,641,000	9,489,883,005	17.37%	18.14%

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
25	BIRO UMUM	124,705,888,000	114,452,015,000	20,586,418,660	16.51%	17.99%
26	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	9,515,134,000	8,954,901,000	1,540,176,552	16.19%	17.20%
27	DIT. STANDARDISASI PANGAN OLAHAN	8,130,472,000	7,859,942,000	1,126,543,836	13.86%	14.33%
28	INSPEKTORAT II	7,836,110,000	7,419,109,000	1,051,048,669	13.41%	14.17%
29	PUSAKOM	21,360,497,000	20,437,674,000	2,726,833,991	12.77%	13.34%
30	BIRO KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	16,393,512,000	15,407,303,000	1,879,594,036	11.47%	12.20%

Peringkat Realisasi Anggaran Balai Besar/Balai Pom

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	65,317,983,000	60,149,475,000	20,156,616,617	30.86%	33.51%
2	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	28,463,787,000	25,840,248,000	7,919,452,724	27.82%	30.65%
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	49,578,166,000	48,178,166,000	14,576,326,075	29.40%	30.26%
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	35,273,134,000	34,560,761,000	10,285,594,241	29.16%	29.76%
5	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	34,886,550,000	30,079,358,000	8,721,716,972	25.00%	29.00%
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	33,322,757,000	33,322,757,000	9,473,164,063	28.43%	28.43%
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	64,132,894,000	61,373,107,000	17,079,656,420	26.63%	27.83%
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	44,028,712,000	42,050,392,000	11,301,075,332	25.67%	26.88%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
9	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	26,935,521,000	20,973,638,000	5,542,795,289	20.58%	26.43%
10	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	73,956,636,000	69,675,940,000	17,871,079,827	24.16%	25.65%
11	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TARAKAN	15,988,031,000	13,905,603,000	3,564,548,958	22.30%	25.63%
12	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	51,319,096,000	49,657,922,000	12,363,853,705	24.09%	24.90%
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SERANG	30,880,170,000	30,178,401,000	7,235,828,793	23.43%	23.98%
14	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	33,032,442,000	28,484,858,000	6,637,830,855	20.09%	23.30%
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	42,007,580,000	39,593,032,000	8,762,022,405	20.86%	22.13%
16	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	29,541,984,000	28,867,474,000	6,345,286,625	21.48%	21.98%
17	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PANGKAL PINANG	20,561,786,000	16,898,430,000	3,495,759,757	17.00%	20.69%
18	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	31,012,982,000	27,155,293,000	5,371,617,439	17.32%	19.78%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	39,715,969,000	36,025,479,000	6,874,553,167	17.31%	19.08%
20	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA	24,933,735,000	23,574,544,000	4,435,653,469	17.79%	18.82%
21	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	31,488,688,000	30,133,659,000	5,649,564,645	17.94%	18.75%
22	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BATAM	26,762,674,000	26,005,967,000	4,874,965,231	18.22%	18.75%
23	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	26,593,219,000	26,089,289,000	4,879,186,122	18.35%	18.70%
24	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	35,314,386,000	33,659,478,000	6,293,266,033	17.82%	18.70%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	29,029,899,000	27,260,992,000	5,093,546,791	17.55%	18.68%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	26,396,633,000	25,422,244,000	4,744,540,622	17.97%	18.66%
27	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN GORONTALO	19,931,864,000	18,233,876,000	3,362,121,304	16.87%	18.44%
28	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	29,803,431,000	28,317,211,000	5,117,387,067	17.17%	18.07%
29	BALAI POM PALOPO	10,409,364,000	9,737,832,000	1,743,141,809	16.75%	17.90%
30	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	50,086,656,000	44,923,934,000	7,944,141,619	15.86%	17.68%
31	BALAI POM BOGOR	10,922,419,000	10,734,581,000	1,852,399,110	16.96%	17.26%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	35,567,261,000	16,837,584,000	2,822,239,816	7.93%	16.76%
33	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	30,912,619,000	29,702,333,000	4,974,474,901	16.09%	16.75%
34	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	46,364,718,000	43,783,669,000	6,980,984,245	15.06%	15.94%
35	BALAI POM TASIKMALAYA	10,893,401,000	10,722,478,000	1,667,366,173	15.31%	15.55%
36	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANOKWARI	37,619,571,000	34,315,531,000	5,193,631,486	13.81%	15.13%
37	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	32,006,163,000	28,631,222,000	4,330,327,924	13.53%	15.12%
38	BALAI POM TANGERANG	10,641,335,000	10,407,967,000	1,545,908,884	14.53%	14.85%
39	BALAI POM KEDIRI	10,982,280,000	10,341,972,000	1,369,721,542	12.47%	13.24%
40	BALAI POM SURAKARTA	9,867,975,000	9,687,955,000	1,267,050,349	12.84%	13.08%
41	BALAI POM JEMBER	8,912,798,000	8,231,020,000	1,014,856,604	11.39%	12.33%
42	BALAI POM PAYAKUMBUH	20,307,443,000	20,107,251,000	1,398,074,634	6.88%	6.95%

Peringkat Realisasi Anggaran Loka Pom

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU	5,681,839,000	4,595,674,000	1,990,116,392	35.03%	43.30%
2	LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU	12,795,089,000	4,214,088,000	1,323,109,386	10.34%	31.40%
3	LOKA POM DI KOTA DUMAI	6,517,731,000	5,036,398,000	1,475,086,560	22.63%	29.29%
4	LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	5,476,746,000	4,848,614,000	1,415,052,743	25.84%	29.18%
5	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	4,207,261,000	4,111,871,000	1,174,332,092	27.91%	28.56%
6	LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS	6,596,812,000	6,047,269,000	1,663,698,387	25.22%	27.51%
7	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	4,648,777,000	4,528,295,000	1,203,121,360	25.88%	26.57%
8	LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	7,491,119,000	5,920,248,000	1,548,680,951	20.67%	26.16%
9	LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENUH	4,290,101,000	4,181,417,000	1,057,798,896	24.66%	25.30%
10	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	4,497,759,000	4,401,155,000	1,096,076,804	24.37%	24.90%
11	LOKA POM DI ACEH TENGAH	4,851,156,000	4,748,313,000	1,177,264,790	24.27%	24.79%
12	LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA	5,288,116,000	5,149,356,000	1,256,264,022	23.76%	24.40%
13	LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI	4,076,674,000	3,992,345,000	971,715,519	23.84%	24.34%
14	LOKA POM DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR	4,037,999,000	3,943,922,000	950,915,411	23.55%	24.11%
15	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	4,930,663,000	4,806,461,000	1,156,112,394	23.45%	24.05%
16	LOKA POM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	4,421,627,000	4,318,465,000	1,035,373,290	23.42%	23.98%
17	LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	4,537,055,000	4,053,046,000	962,138,085	21.21%	23.74%
18	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	4,221,085,000	4,088,322,000	933,263,507	22.11%	22.83%
19	LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA	3,708,723,000	3,622,575,000	825,104,517	22.25%	22.78%
20	LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG	4,801,300,000	4,711,436,000	1,052,305,462	21.92%	22.34%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
21	LOKA POM DI KABUPATEN BIMA	4,931,885,000	4,795,033,000	1,053,404,122	21.36%	21.97%
22	LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN	5,919,745,000	4,804,589,000	1,055,293,212	17.83%	21.96%
23	LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU	4,364,947,000	4,225,444,000	919,733,737	21.07%	21.77%
24	LOKA POM DI KABUPATEN TULANGBAWANG	4,713,791,000	4,181,918,000	903,565,736	19.17%	21.61%
25	LOKA POM DI ACEH SELATAN	4,534,266,000	4,412,981,000	910,023,311	20.07%	20.62%
26	LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG	15,985,780,000	5,089,943,000	1,039,834,550	6.50%	20.43%
27	LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	5,441,410,000	4,775,791,000	925,575,344	17.01%	19.38%
28	LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI	4,137,387,000	4,025,637,000	765,720,920	18.51%	19.02%
29	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	4,590,806,000	4,501,643,000	823,495,502	17.94%	18.29%
30	LOKA POM DI KOTA BAUBAU	6,921,404,000	6,215,079,000	1,118,864,320	16.17%	18.00%
31	LOKA POM DI KABUPATEN ENDE	7,901,955,000	7,453,167,000	1,309,957,663	16.58%	17.58%



KINERJA BPOM DALAM ANGKA

TRIWULAN I TAHUN 2024



Jln. Percetakan Negara Jakarta Pusat
10560



021 4244691



www.pom.go.id



halobpom@pom.go.id



[@bpom_ri](https://twitter.com/bpom_ri)



[Bpom RI](https://www.facebook.com/Bpom.RI)